

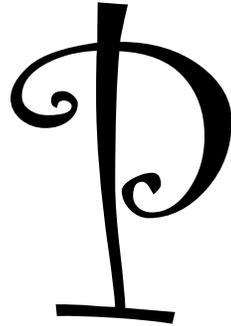
LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PERIZINAN DAN
KENELAYANAN
TAHUN 2020



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP 2020**

KATA PENGANTAR



uji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-NYA sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun Anggaran 2020 ini dengan baik. Substansi yang tertuang di dalam laporan kinerja ini adalah segala pelaksanaan kegiatan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah : 1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta 2) sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan pada laporan ini. Oleh karena itu kami mengharapkan Bapak, Ibu dan rekan-rekan untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangun. Kritik konstruktif dari bapak, ibu dan para pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan periode selanjutnya.

Akhir kata semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian.

Jakarta, 15 Januari 2021

Direktur Perizinan dan Kenelayanan

Dr. Ir. Ridwan Mulyana, MT

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	TUGAS DAN FUNGSI	2
	1.2.1 KOORDINATOR BIDANG PERIZINAN	4
	1.2.2 KOORDINATOR BIDANG HARMONISASI DAN PEMANTAUAN PERIZINAN	4
	1.2.3 KOORDINATOR BIDANG KELEMBAGAAN DAN PERLINDUNGAN NELAYAN	5
	1.2.4 KOORDINATOR BIDANG USAHA NELAYAN	6
	1.2.5 SUB KOORDINATOR BIDANG TATA USAHA	7
	1.2.6 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	7
1.3	ISU STRATEGIS	7
	1.3.1 SUMBER DAYA IKAN	7
	1.3.2 SARANA DAN PRASARANA	8
	1.3.3 USAHA DAN KENELAYANAN	9
1.4	SISTEMATIKA PENYAJIAN	9
BAB 2	PERENCANAAN KINERJA	11
2.1	VISI DAN MISI DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	11
2.2	MOTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	11
2.3	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN	12
2.4	RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA	14
BAB 3	AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	
	3.1.1 PENDAPATAN NELAYAN MENINGKAT	17
	IKU 1 RATA – RATA PENDAPATAN NELAYAN / BULAN	17
	3.1.2 PENGELOLAAN PERIZINAN SESUAI KETENTUAN	18
	IKU 2 PERSENTASE PENATAAN PERIZINAN USAHA PENANGKAPAN IKAN	18
	3.1.3 PENGELOLAAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU YANG MANDIRI	18
	IKU 3 TINGKAT KEMANDIRIAN SKPT NATUNA YANG MANDIRI	18
	3.1.4 TATA KELOLA DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN YANG BAIK	23
	IKU 4 INDEKS PROFESIONALITAS ASN DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN	23
	IKU 5 NILAI REKONSILIASI KINERJA DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN	24

	IKU 6	PERSENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA SUDAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN	25
	IKU 7	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN	26
	IKU 8	PERSENTASE UNIT KERJA DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR	26
	IKU 9	TINGKAT EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS / STRATEGIS DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN	27
	IKU 10	NILAI IKPA DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN	27
3.2	AKUNTABILITAS KEUANGAN		29
PENUTUP			32
DATA DUKUNG			

DAFTAR TABEL

TABEL 1	RENCANA KINERJA DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN TAHUN 2020
TABEL 2	KOMPOSISI ANGGARAN BERDASARKAN JENIS KEGIATAN TAHUN 2019
TABEL 3	RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020
TABEL 4	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS (SS) DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 5	TARGET DAN REALISASI IKU RATA – RATA PENDAPATAN NELAYAN
TABEL 6	PERBANDINGAN CAPAIAN DAN TARGET RATA – RATA PENDAPATAN NELAYAN
TABEL 7	TARGET DAN REALISASI PERSENTASE PENATAAN PERIZINAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
TABEL 8	TARGET DAN REALISASI TINGKAT KEMANDIRIAN SKPT NATUNA
TABEL 9	PERBANDINGAN REALISASI DAN TERGET TINGKAT KEMANDIRIAN SKPT NATUNA
TABEL 10	TARGET DAN REALISASI IP ASN DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN TAHUN 2020
TABEL 11	PERBANDINGAN DAN TARGET IP ASN DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 12	TARGET DAN REALISASI NILAI REKONSILIASI KINERJA DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 13	TARGET DAN REALISASI PERSENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA SUDAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN
TABEL 14	TARGET DAN REALISASI JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 15	PERBANDINGAN CAPAIAN JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 16	TARGET DAN CAPAIAN PERSENTASE UNIT KERJA DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR
TABEL 17	PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE UNIT KERJA DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR
TABEL 18	TARGET DAN CAPAIAN TINGKAT EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS / STRATEGIS DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 19	TARGET DAN CAPAIAN NILAI IKPA DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 20	PERBANDINGAN CAPAIAN NILAI IKPA DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 21	ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN JENIS KEGIATAN
TABEL 22	ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN JENIS BELANJA

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIT. PDK
GAMBAR 2	PENILAIAN STATUS SKPT NATUNA
GAMBAR 3	GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
GAMBAR 4	DASHBOARD KINERJAKU

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2020 didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 54.663.960.000,-** yang tertuang pada DIPA Tahun 2020 dengan nomor Surat Pengesahan DIPA-032.03.1.465023/2020 Tanggal 23 Desember Tahun 2019. Pada tanggal 29 April 2020, anggaran ini kemudian direvisi menjadi **Rp. 20.179.410.000,-**. Hal ini disebabkan karena adanya pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah terkait penanganan covid -19. (Triwulan II). Pada Tanggal 14 Agustus 2020, terdapat penambahan dana stimulus sebesar **Rp. 24.500.000.000,-** sehingga anggaran bertambah menjadi **Rp. 44.679.410.000,-**. Pada Tanggal 04 November 2020, anggaran direvisi lagi menjadi **47.267.410.000,-**. dan revisi yang terakhir yaitu Tanggal 30 Desember 2020, total anggaran menjadi **Rp. 50.961.202.000,-**. (Tambahan dana Hibah)

Untuk mencapai program yang telah direncanakan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Triwulan I Tahun 2020, memiliki 7 sasaran strategis yang didukung oleh 11 Indikator Kinerja Utama. Pada triwulan II terjadi perubahan baik dari segi sasaran maupun Indikator Kinerja Utamanya. Sasaran Strategis yang tadinya 7 SS, menjadi 4 SS. Begitu pula dengan Indikator Kinerja Utama yang tadinya 11 Indikator menjadi 10 Indikator. Hal ini disebabkan karena adanya pemangkasan anggaran yang menyebabkan ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya ditiadakan dan tidak menjadi prioritas ditahun ini. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
				Tahun 2020	Tahun 2020	Persentase (%)
1	Pendapatan nelayan meningkat	1	Rata rata pendapatan nelayan / bulan	3,86	3,91	100
2	Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan	2	Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan	100	101	101
3	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	3	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna	4	4	100
4	Tata kelola Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang baik	4	Indeks profesionalitas ASN Dit. Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	72	80,13	111,29
		5	Nilai rekonsiliasi kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan	85	86,70	102
		6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan.	100	129,63	120

No	SASARAN STRATEGIS	Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
				Tahun 2020	Tahun 2020	Persentase (%)
		7	Jumlah Inovasi pelayanan publik Dit. Perizinan dan Kenelayanan	1	1	100
		8	Persentase unit kerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar	82	91,50	111,59
		9	Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan	70	92,93	120
		10	Nilai IKPA Dit. Perizinan dan Kenelayanan	88	75,92	86,27

Bab 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipinggirkan, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedaulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, diamanatkan bahwa salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian (control) untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu,

pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.

Selain perubahan terhadap fokus kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan, juga terdapat perubahan terkait dengan alokasi anggaran dimana pada periode pemerintahan sebelumnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan sebagian besar anggarannya pada pembangunan pelabuhan perikanan, namun pada periode pemerintahan saat ini difokuskan kepada pengadaan kapal perikanan. Hal ini bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan perikanan tangkap kepada nelayan sehingga nelayan secara langsung dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan perikanan tangkap. Di sisi lain, fokus pelabuhan perikanan adalah pada upaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pelabuhan perikanan yang telah ada agar dapat difungsikan secara optimal. Keseluruhan pembangunan ini akan dilaksanakan secara efektif dan efisien pada tahun 2018 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang dan tetap dengan menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020, melakukan penyusunan Laporan Kinerja setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RPJMN 2020 – 2024 dan RKP tahun 2020. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2020.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

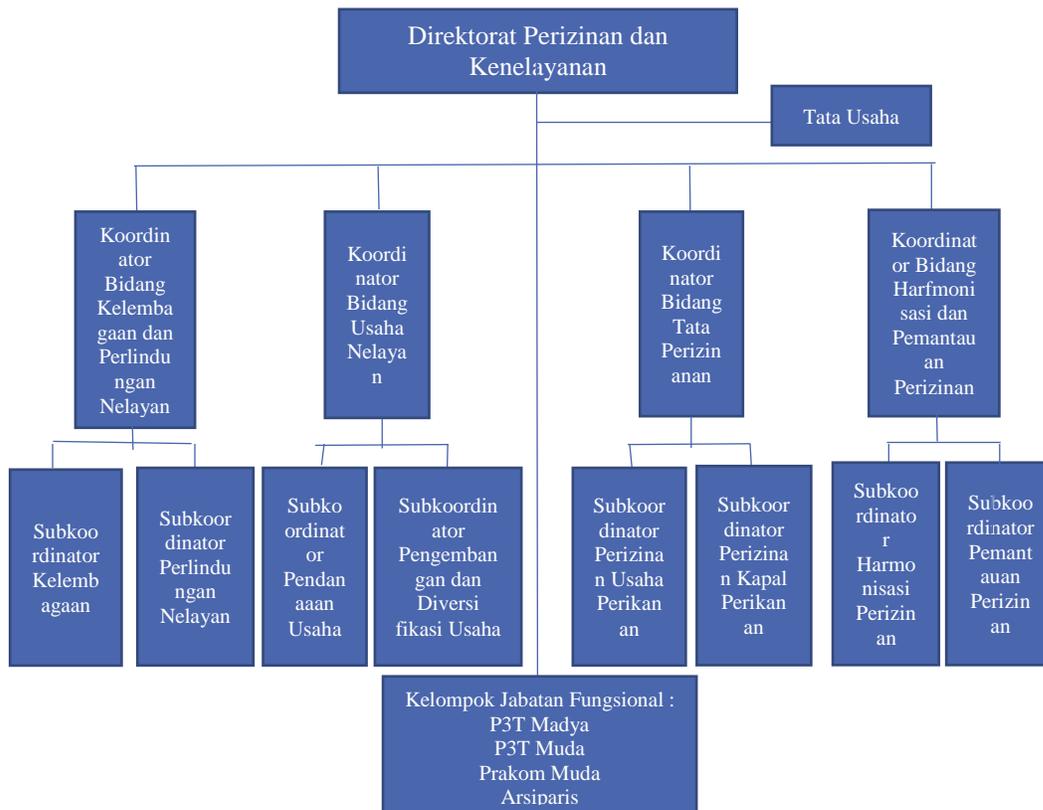
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang sampai saat ini masih dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan kenelayanan Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menyelenggarakan fungsi yakni:

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang tata perizinan harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang tata perizinan harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
6. Pelaksanaan urusa tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Adapun susunan organisasi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan terdiri atas:

- a. **Koordinator Bidang Tata Perizinan**, yang terdiri atas Subkoordinator Perizinan Usaha Perikanan dan Subkoordinator Perizinan Kapal Perikanan,
- b. **Koordinator Bidang Harmonisasi dan Pemantauan Perizinan**, terdiri atas Subkoordinator Harmonisasi Perizinan dan Subkoordinator Pemantauan Perizinan,
- c. **Koordinator Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan**, terdiri atas Subkoordinator Kelembagaan dan Subkoordinator Perlindungan Nelayan,
- d. **Koordinator Bidang Usaha Nelayan**, terdiri atas Subkoordinator Pendanaan Usaha dan Subkoordinator Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan,
- e. **SubKoordinator Bidang Tata Usaha**; dan
- f. **Kelompok Jabatan Fungsional**



Gambar 1. Bagan Struktur organisasi Dit. PDK

1.2.1 Koordinator Bidang Tata Perizinan

Subdirektorat Tata Perizinan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan usaha perikanan, perizinan kapal perikanan, verifikasi dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, analisis pungutan kapal perikanan, analisis penyiapan dan penerbitan perizinan usaha dan kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Subdirektorat Tata Perizinan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang identifikasi, analisis dan verifikasi kelayakan rencana usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal dan alat penangkap ikan, penghitungan dan validasi pungutan perikanan untuk surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin penangkapan ikan (SIPI)/Surat Izin Usaha Perikanan Indonesia (SIKPI), penerbitan perizinan usaha perikanan dan perizinan kapal perikanan, rekomendasi pemberian sanksi administrasi perizinan usaha perikanan dan perizinan kapal perikanan.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang identifikasi, analisis, dan verifikasi kelayakan rencana usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal dan alat penangkap ikan, penghitungan dan validasi pungutan dan perikanan untuk SIUP dan SIPI/SIKPI, Penerbitan perizinan usaha perikanan dan perizinan kapal perikanan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria dibanding identifikasi, analisis dan verifikasi kelayakan rencana usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal dan alat penangkap ikan, penghitungan dan validasi pungutan perikanan untuk SIUP dan SIPI/SIKPI, penerbitan perizinan usaha perikanan dan perizinan kapal perikanan;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang identifikasi, analisis dan verifikasi kelayakan rencana usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal dan alat penangkap ikan, penghitungan dan validasi pungutan perikanan untuk SIUP dan SIPI/SIKPI, penerbitan perizinan usaha perikanan dan perizinan kapal perikanan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang identifikasi, analisis dan verifikasi kelayakan rencana usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal dan alat penangkap ikan, penghitungan dan validasi pungutan perikanan untuk SIUP dan SIPI/SIKPI, penerbitan perizinan usaha perikanan dan perizinan kapal perikanan;

1.2.2 Koordinator Bidang Harmonisasi dan Pemantauan Perizinan

Subdirektorat Harmonisasi dan Pemantauan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan dibidang Harmonisasi dan Pemantauan perizinan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Subdirektorat Harmonisasi dan Pemantauan Perizinan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang implementasi system, integrasi dan pengelolaan data perizinan pusat dan daerah, pemantauan perizinan, pemberian sanksi administrative dan analisis laporan kegiatan usaha perikanan, serta pendampingan penerbitan dokumen kapal bantuan pemerintah;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang implementasi system, integrasi dan pengelolaan data perizinan pusat dan daerah, pemantauan perizinan, pemberian sanksi administrative dan analisis laporan kegiatan usaha perikanan, serta pendampingan penerbitan dokumen kapal bantuan pemerintah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang implementasi system, integrasi dan pengelolaan data perizinan pusat dan daerah, pemantauan perizinan, pemberian sanksi administrative dan analisis laporan kegiatan usaha perikanan, serta pendampingan penerbitan dokumen kapal bantuan pemerintah;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang implementasi system, integrasi dan pengelolaan data perizinan pusat dan daerah, pemantauan perizinan, pemberian sanksi administrative dan analisis laporan kegiatan usaha perikanan, serta pendampingan penerbitan dokumen kapal bantuan pemerintah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang implementasi system, integrasi dan pengelolaan data perizinan pusat dan daerah, pemantauan perizinan, pemberian sanksi administrative dan analisis laporan kegiatan usaha perikanan, serta pendampingan penerbitan dokumen kapal bantuan pemerintah;

1.2.3 Koordinator Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan

Subdirektorat Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang Kelembagaan dan perlindungan nelayan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Subdirektorat Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan kebijakan di bidang fasilitasi penumbuhan, pengembangan dan kerjasama/kemitraan/kelompok usaha bersama (KUB)/Koperasi/asosiasi/himpunan nelayan, identifikasi kelompok calon penerima bantuan, pendataan nelayan, pengelolaan kartu nelayan, klasifikasi nelayan, asuransi nelayan, dan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan serta upaya peningkatan ketahanan nelayan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penumbuhan, pengembangan dan kerjasama/kemitraan/kelompok usaha bersama (KUB)/Koperasi/asosiasi/himpunan nelayan, identifikasi kelompok calon penerima bantuan, pendataan nelayan, pengelolaan kartu nelayan, klasifikasi nelayan, asuransi nelayan, dan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan serta upaya peningkatan ketahanan nelayan;

- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penumbuhan, pengembangan dan kerjasama/kemitraan/kelompok usaha bersama (KUB)/Koperasi/asosiasi/himpunan nelayan, identifikasi kelompok calon penerima bantuan, pendataan nelayan, pengelolaan kartu nelayan, klasifikasi nelayan, asuransi nelayan, dan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan serta upaya peningkatan ketahanan nelayan;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penumbuhan, pengembangan dan kerjasama/kemitraan/kelompok usaha bersama (KUB)/Koperasi/asosiasi/himpunan nelayan, identifikasi kelompok calon penerima bantuan, pendataan nelayan, pengelolaan kartu nelayan, klasifikasi nelayan, asuransi nelayan, dan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan serta upaya peningkatan ketahanan nelayan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penumbuhan, pengembangan dan kerjasama/kemitraan/kelompok usaha bersama (KUB)/Koperasi/asosiasi/himpunan nelayan, identifikasi kelompok calon penerima bantuan, pendataan nelayan, pengelolaan kartu nelayan, klasifikasi nelayan, asuransi nelayan, dan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan serta upaya peningkatan ketahanan nelayan;

1.2.4 Koordinator Bidang Usaha Nelayan

Subdirektorat Usaha Nelayan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang pendanaan usaha serta pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Subdirektorat Usaha Nelayan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis kebutuhan modal, fasilitasi akses pendanaan nelayan melalui lembaga keuangan bank dan non bank, penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Konsultan Keuangan Keuangan Mitra (KKMB) bidang perikanan tangkap, pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan, serta pengembangan usaha alternative bagi nelayan dan keluarganya;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebutuhan modal, fasilitasi akses pendanaan nelayan melalui lembaga keuangan bank dan non bank, penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Konsultan Keuangan Keuangan Mitra (KKMB) bidang perikanan tangkap, pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan, serta pengembangan usaha alternative bagi nelayan dan keluarganya;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisis kebutuhan modal, fasilitasi akses pendanaan nelayan melalui lembaga keuangan bank dan non bank, penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Konsultan Keuangan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan tangkap, pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan, serta pengembangan usaha alternative bagi nelayan dan keluarganya;

- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang analisis kebutuhan modal, fasilitasi akses pendanaan nelayan melalui lembaga keuangan bank dan non bank, penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan tangkap, pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan, serta pengembangan usaha alternative bagi nelayan dan keluarganya;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis kebutuhan modal, fasilitasi akses pendanaan nelayan melalui lembaga keuangan bank dan non bank, penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan tangkap, pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan, serta pengembangan usaha alternative bagi nelayan dan keluarganya;

1.2.5 Subkoordinator Bidang Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan peaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan kinerja dan barang milik Negara, Sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan lingkup direktorat.

1.2.6 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional tersebut dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

1.3 ISU STRATEGIS

Permasalahan dalam pengembangan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem. Permasalahan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yakni permasalahan sumber daya ikan, sarana dan prasarana serta permasalahan pada pelayanan dan pengembangan usaha.

1.3.1 Sumber Daya Ikan

Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan khususnya terkait dengan kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan lingkungan baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, faktor manusia harus menjadi faktor kendali untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadinya degradasi sumber daya ikan sebagian besar akibat aktivitas manusia dalam mengeksploitasi SDI yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu, tuntutan kebutuhan manusia dalam mengeksploitasi SDI (kepentingan ekonomi) harus seimbang dengan tuntutan ketersediaan sumber daya ikan di masa mendatang (kepentingan sumber daya ikan dan lingkungannya).

Permasalahan-permasalahan pokok SDI yang harus menjadi perhatian masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengembangan usaha perikanan tangkap sebagai berikut:

- a. Masih maraknya *Illegal, Unregulated, and Unreported* (IUU) Fishing;
- b. Ketidakseimbangan pemanfaatan SDI antar WPP-NRI;
- c. Belum optimalnya akurasi data kondisi stok sumber daya ikan, hasil tangkapan dan tingkat eksploitasi sumber daya ikan;
- d. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut;
- e. Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan hasil tangkapan ikan yang akurat, obyektif dan tepat waktu;
- f. Belum optimalnya sinergi pengelolaan sumber daya ikan antara pusat dan daerah, antar daerah, serta dengan sektor terkait.

1.3.2 Sarana dan Prasarana

Pengembangan usaha perikanan tangkap akan optimal jika didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut mencakup: kapal dan alat tangkap, pelabuhan perikanan beserta fasilitasnya, dan sarana dan prasarana pendukung usaha penangkapan ikan lainnya. Permasalahan-permasalahan pokok terkait sarana dan prasarana dalam pengembangan perikanan tangkap antara lain sebagai berikut:

- a. Struktur armada penangkapan ikan masih didominasi oleh armada skala kecil (di bawah 5 GT) dengan kemampuan yang terbatas;
- b. Masih banyaknya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
- c. Sebaran pelabuhan perikanan tidak merata dan sebagian besar di Indonesia Bagian Barat;
- d. Pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan belum lengkap sehingga masih ada pelabuhan perikanan yang belum dapat dimanfaatkan dengan baik;
- e. Belum optimalnya pengelolaan pelayanan pelabuhan perikanan, termasuk sistem pendataan, peningkatan investasi, dan pengendalian lingkungan;
- f. Kurangnya kesadaran stakeholders dalam memanfaatkan fasilitas dan kawasan pelabuhan secara berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Jumlah tenaga syahbandar yang masih kurang;
- h. Cara penanganan ikan di pelabuhan perikanan belum optimal;
- i. Belum seluruh pelabuhan perikanan melaksanakan ketelusuran asal ikan (traceability)/penerapan SHTI untuk kepentingan produk ekspor maupun konsumsi dalam negeri;

- j. Ketersediaan infrastruktur termasuk listrik khususnya di luar pulau Jawa yang masih terbatas sehingga mempengaruhi usaha penangkapan.

1.3.3 Usaha dan Kenelayan

Beberapa permasalahan pokok terkait usaha dan kenelayan adalah sebagai berikut:

- a. Kemiskinan nelayan yang masih tinggi;
- b. Skala usaha dan kemampuan kelembagaan usaha nelayan yang masih kecil dan perlu terus ditingkatkan;
- c. Rendahnya akses usaha nelayan terhadap permodalan yang antara lain disebabkan dukungan perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang belum optimal terhadap usaha perikanan tangkap;
- d. Rantai tata niaga perikanan yang masih panjang sehingga merugikan nelayan;
- e. Masih minimnya perlindungan sosial bagi nelayan;
- f. Kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang perikanan tangkap yang masih perlu ditingkatkan.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang transparan, dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pertriwulan selama satu tahun berjalan. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap triwulanan sebagai berikut :

1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

Bab 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN

Pengarusutamaan prioritas nasional pada pengelolaan sumber daya kemaritiman dan kelautan semakin menguatkan peran sektor kelautan dan perikanan untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sektor kelautan dan perikanan, peran sub Direktorat Perizinan dan Kenelayanan memiliki sasaran strategis yang ingin dicapai sbb: (a) meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP (b) meningkatnya perizinan dan kenelayanan nasional (c) Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan perizinan dan kenelayanan untuk menjalankan peran strategi tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut:

“Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib dan Berkelanjutan” dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Efisien**, diartikan sebagai kemampuan dalam memberikan layanan perizinan yang lebih terkontrol, terpantau, cepat, tepat dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.
2. **Tertib**, diartikan dalam memberikan layanan perizinan sesuai dengan alur prosedur yang sudah ditertibkan.
3. **Berkelanjutan** dimaksudkan pemberian layanan perizinan dapat digunakan untuk mengelola dan melindungi sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.

Ketiga hal dalam *visi* tersebut di atas merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan kedalam *misi*, strategi dan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Misi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian dan pemanfa
2. atan sumberdaya ikan melalui perizinan;
3. Penertiban dan peningkatan keberlanjutan usaha perikanan tangkap melalui perizinan

2.2 MOTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN

Dalam melaksanakan fungsinya, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan memiliki MOTO '*Cepat Efektif Pasti Efisiensi dan Transparansi*'. Adapun **Maklumat** pelayanan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan sbb :

Seluruh unsur pimpinan dan staf Direktorat Perizinan dan Kenelayanan akan melakukan upaya – upaya pelayanan kepada masyarakat secara transparan, akurat dan akuntabel ;

1. Melaksanakan standar pelayanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah dan terjangkau serta tidak ada diskriminasi.
3. Menolak dan tidak menerima pemberian apapun yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik.
4. Menerima kritik dan pengaduan masyarakat serta secepatnya mengambil tindakan untuk memberikan solusinya.
5. Menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku apabila tidak melaksanakan standar pelayanan yang ada.

2.3 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN DJPT 2020 – 2024, pada tabel berikut adalah target kinerja dan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2020.

Tabel 1. Rencana Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE				
1	Pendapatan nelayan meningkat	1	Rata rata pendapatan nelayan / bulan	3,860
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE				
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	2	Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan	100
3	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	3	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT Natuna)	4
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE				
4	Tata Kelola Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang baik	4	Indeks profesionalitas ASN Dit. Perizinan dan Kenelayanan (Indeks)	72
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan	85
		6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	100
		7	Jumlah inovasi pelayanan publik Dit. Perizinan dan Kenelayanan	1
		8	Persentase unit kerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2020
		9	Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan	70
		10	Nilai IKPA Dit. Perizinan dan Kenelayanan	88

Pada tahun 2020 anggaran pembangunan perikanan tangkap melalui program pengelolaan perikanan tangkap adalah sebesar **Rp. 50.961.202.000,-** milyar dengan rincian untuk masing masing kegiatan adalah sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2020

NO	KEGIATAN	PAGU
		(Rp. 000)
1	Alokasi izin yang diterbitkan	1.613.545
2	Realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP	2.682.248
3	Sistem Perizinan pusat – daerah yang terintegrasi	9.135.182
4	Bantuan premi asuransi nelayan yang tersalurkan	183.440
5	Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap	2.157.320
6	Keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya	2.946.800
7	Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan yang difasiltasi sertifikasinya	575.280
8	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya	1.014.290
9	Kawasan sentra / kampung nelayan yang difasilitasi penataannya	281.330
10	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri	1.104.990
11	Fasilitasi Nelayan yang terlindungi	858.425
12	Sarana pengembangan usaha nelayan yang disalurkan	24.500.000
13	Layanan perkantoran	214.560
TOTAL		50.961.202

2.4 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada tahun berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU pada perspektif internal proses dan *learning and growth* sebagaimana pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
1	Tingkat kemandirian SKPT Natuna dibawah tanggung jawab Dit. Perizinan dan Kenelayanan (Tingkat)	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna yang mandiri
2	Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan	Identifikasi, analisis dan verifikasi kelayakan rencana usaha perikanan
		Penataan alokasi usaha penangkapan ikan
		Pelayanan penerbitan izin usaha penangkapan ikan
		Evaluasi pemberian lokasi izin usaha penangkapan ikan
		Identifikasi, analisis dan verifikasi dokumen kapal perikanan
		Evaluasi pemberian izin kapal perikanan (SIPI/SIKPI)
		Pelayanan penerbitan izin kapal penangkap/pengangkut ikan (SIPI/SIKPI)
		Pelaksanaan pungutan hasil perikanan (PNBP)
		Penyusunan pedoman pengelolaan perizinan pusat dan daerah
		Koordinasi dalam rangka pembinaan dan integrasi sistem perizinan pusat dan daerah
		Pendampingan dan integrasi sistem perizinan pusat dan daerah
		Evaluasi pengelolaan perizinan pusat dan daerah
		Pendampingan penerbitan dokumen kapal bantuan pemerintah
Analisis kegiatan usaha perikanan dalam rangka penerbitan perizinan		
3	Indeks profesionalitas ASN Dit. Perizinan dan Kenelayanan (Indeks)	Pelayanan administrasi jabatan fungsional
		Peningkatan kemampuan ASN melalui pengembangan kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar dan Sosialisasi
		Penataan, Perencanaan dan Rekrutmen ASN berbasis kompetensi

NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
4	Nilai Rekonsiliasi kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan	Monitoring dan Evaluasi kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan
5	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	Monitoring dan evaluasi SPIP Maturitas Dit. Perizinan dan Kenelayanan
6	Jumlah inovasi pelayanan publik Dit. Perizinan dan Kenelayanan	Rekomendasi inovasi pelayanan publik Dit. Perizinan dan Kenelayanan
7	Persentase unit kerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	Penggunaan aplikasi Bitrix.24 lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan
8	Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan	Percepatan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan
9	Nilai IKPA Dit. Perizinan dan Kenelayanan	Penyusunan RKA-KL / DIPA Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Bab 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap Sampai dengan akhir Tahun 2020 diukur melalui 10 indikator kinerja utama (IKU) yang terbagi ke dalam 3 (empat) perspektif yakni sebagai berikut :

- Perspektif Customer sebanyak 1 (Satu) indikator;
- Perspektif internal proses sebanyak 2 (Empat) indikator;
- Perspektif Learning and growth sebanyak 7 (Tujuh) indikator.

Rata – rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Direktorat Perizinan dan Kenelayanan adalah **101,99** persen dengan rincian pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Capaian Sasaran Strategis (SS) Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	
				THN 2020	% thd Target Tahunan
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE					
1	Pendapatan nelayan meningkat	1 Rata rata pendapatan nelayan / bulan	3,86	4,06	105,18
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE					
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	2 Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan	100	101	101
3	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	3 Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna	4	4	100
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE					
4	Tata kelola Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang baik	4 Indeks Profesoanalitas ASN Dit. Perizinan dan Kenelayanan	72	80,13	111,29
		5 Nilai rekonsiliasi kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan	85	86,70	102
		6 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	100	129,63	129,63
		7 Jumlah inovasi pelayanan publik Dit. Perizinan dan Kenelayann (Inovasi)	1	1	100
		8 Persentase unit kerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	82	91,50	111,59

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	
				THN 2020	% thd Target Tahunan
		9 Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan	70	92,93	132,76
		10 Nilai IKPA Dit. Perizinan dan Kenelayanan	Baik (88)	75,92	86,27

3.1.1 Pendapatan Nelayan Meningkat

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni (1) Rata rata pendapatan nelayan / bulan

1. Rata – rata pendapatan nelayan / bulan

Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Perikanan (RTP) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata selisih antara penerimaan dari hasil tangkapan yang diperoleh dengan besarnya biaya yang dikeluarkan Rumah Tangga Produksi (RTP) tersebut selama periode tahun 2020 yang diukur dan dilaporkan setiap bulan berupa angka capaian sementara. Adapun capaian rata-rata pendapatan nelayan/bulan tahun 2020 adalah 4,06 atau sebesar 105,18% dari target.

Tabel 5. Target dan Realisasi IKU Rata – rata pendapatan nelayan Tahun 2020

Satuan : %

Nama IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Capaian
Rata rata pendapatan nelayan / bulan	3,86	4,06	105,18

Tabel. 6 Perbandingan capaian Rata – rata pendapatan nelayan/bulan

Nama IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Capaian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2016
Rata – rata pendapatan nelayan / bulan	3,86	4,06	105,18	-	2,43	3,31	

Dari tabel Perbandingan rata-rata pendapatan nelayan Tahun 2020 terhadap Realisasi Beberapa Tahun Sebelumnya dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan nelayan setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Nilai capaian di tahun 2018 mengalami penurunan dibanding pada tahun sebelumnya(2017), kemudian mengalami kenaikan lagi di tahun 2020. Pada tahun 2019 terlihat tidak ada capaian, karena pada tahun 2019, IKU ini memang tidak masuk dalam IKU Dit. Perizinan dan Kenelayanan.

3.1.2 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan

1. Persentase Penataan Perizinan Usaha Penangkapan Ikan

Merupakan persentase penataan perizinan dilaksanakan melalui ijin usaha perikanan pusat yang diterbitkan, Realisasi kapal izin pusat terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP, serta pembinaan dan implementasi integrasi sistem perizinan daerah (SIMKADA) diseluruh Indonesia. Adapun capaian persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan tahun 2020 adalah sebesar 101 atau sebesar 101% dari target.

Tabel. 7 Persentase Penataan Perizinan usaha Penangkapan Ikan

Nama IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Capaian
Persentase penataan Perizinan Usaha Penangkapan Ikan	100	101	101

Nilai tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena indikator baru ada pada tahun 2020.

3.1.3 Pengelolaan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT Natuna).

1. Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT Natuna)

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di pulau pulau kecil dan kawasan perbatasan, yang selanjutnya disebut SKPT merupakan bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan. Tujuan dari SKPT adalah membangun dan mengintegrasikan proses bisnis KP berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya KP di pulau pulau kecil dan / atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Lokasi SKPT dan penanggung jawab ditetapkan melalui Permen KP Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang penugasan pelaksanaan pembangunan SKPT di pulau - pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Kepulauan Natuna, merupakan salah satu wilayah terluar dan daerah perbatasan yang menjadi lokasi SKPT Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perairan Natuna berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan WPP-NRI 711 yang diketahui menyimpan potensi perikanan tangkap yang besar mencapai 1,1 juta ton/tahun (Data Komnaskajiskan). Dan kegiatan SKPT Natuna dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa. Data dan informasi yang digunakan

untuk penilaian SKPT yang mandiri diperoleh melalui data primer (pengamatan visual, observasi langsung, interview di lokasi SKPT, Laporan), data sekunder, dan focus group discussion (FGD). Selanjutnya untuk mengetahui

Ada empat hal yang hendak dicapai dari pembangunan SKPT Natuna. Pertama SKPT diharapkan bisa menumbuhkan sistem bisnis perikanan di Natuna. Kedua, keberadaan SKPT diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat Natuna. Ketiga, SKPT bisa menjadi solusi pemenuhan konsumsi ikan untuk ketahanan pangan penduduk baik di Natuna dan daerah lain di Indonesia, dan yang terakhir, SKPT diharapkan bisa mendorong peningkatan ekspor hasil perikanan Natuna.

Pembangunan SKPT Natuna dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas-fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan perikanan seperti dermaga, jalan, drainase dan trotoar, kantor pengelola pelabuhan, listrik PLN, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan, air bersih, tempat pemasaran/pelelangan ikan, pengolahan limbah/IPAL, integrated cool storage/ICS, pabrik es, kios perbekalan nelayan, rumah ibadah, serta fasilitas pendukung lainnya seperti truk mini crane, mobil tangki air dan kendaraan pengangkut sampah.

Dalam pembangunan SKPT Natuna, KKP menggandeng peran serta sejumlah pihak, mulai dari keterlibatan penuh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten Natuna dan juga BUMN. Saat ini operasionalisasi integrated cool storage/ICS kapasitas 200 ton dilaksanakan bekerjasama dengan BUMN Perindo yang beroperasi sejak Juni 2017.

Bagi nelayan-nelayan di sekitar lokasi SKPT Natuna yang tergabung dalam koperasi, pemerintah juga memberikan bantuan kapal perikanan lengkap dengan alat tangkap ramah lingkungan dan fasilitas rantai dingin ikan hasil tangkapan berupa kendaraan berpendingin, coolbox. Kepada mereka juga diberikan sejumlah pelatihan-pelatihan keterampilan operasional penangkapan ikan, cara penanganan ikan yang baik/CPIB. Pelatihan ini diberikan agar para nelayan bisa memaksimalkan hasil tangkapan mereka dan turut menjaga kesinambungan sumber daya laut. Para nelayan Natuna juga dibekali dengan bantuan premi asuransi nelayan.

Bantuan ini disalurkan melalui koperasi-koperasi nelayan yang ada di Natuna. Dengan diberikannya bantuan tersebut diharapkan akan bisa meningkatkan hasil tangkapan yang ujungnya tentu akan meningkatkan kesejahteraan para nelayan Natuna.

Keberadaan SKPT Natuna yang berada di selat Lampa ini diharapkan bisa mendorong para pelaku usaha sektor perikanan nasional bisa mengembangkan dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia untuk usaha mereka di wilayah ini. Pelabuhan Perikanan Selat Lampa dapat segera diramaikan aktifitas perikanan bagi kapal-kapal izin daerah Provinsi Kepulauan Riau dan izin pusat dan menjadikan pelabuhan pangkalan utama bagi kegiatan kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan WPP 711 (Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Natuna Utara).

Kehadiran para pelaku usaha perikanan nasional di kawasan SKPT Natuna tentunya akan menjadikan potensi sumber daya laut yang ada di wilayah ini bisa tergali dengan maksimal. Perekonomian masyarakat lokal pun turut meningkat sehingga menghadirkan pemerataan ekonomi nasional. Dan yang paling terpenting adalah kedaulatan negeri ini bisa terjaga. Pada bulan Oktober 2019, pendirian SKPT Natuna akhirnya diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Tabel 8. Target dan Realisasi IKU Tingkat kemandirian SKPT Natuna dibawah tanggungjawab Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2020

Nama IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Capaian
Tingkat kemandirian SKPT Natuna dibawah tanggung jawab Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	4	4	100

Tabel 9. Perbandingan Realisasi dan terget tahun 2020

Nama IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Capaian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2016
Tingkat kemandirian SKPT Natuna dibawah tanggung jawab Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	4	4	100	4	4	4	4

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, capaian tingkat kemandirian SKPT Natuna dari tahun ketahun tidak mengalami perubahan. Namun jika dilihat dari aspek kriteria penilaian, apakah itu dari segi aspek fisik, aspek produksi dan ekonomi, aspek kelembagaan, maupun dari segi aspek kelembagaan dan lingkungannya maka akan ditemukan ada kenaikan capaian yang mengantarkan SKPT ini sudah masuk dalam kategori pra mandiri.

Data dan informasi yang digunakan untuk penilaian SKPT yang mandiri diperoleh melalui data primer (pengamatan visual, observasi langsung, interview dilokasi SKPT, Laporan), data sekunder dan Focus Group Discussion (FGD). Selanjutnya untuk mengetahui status pengelolaan SKPT yang mandiri, maka disusunlah instrument dan penilaian status SKPT yang mandiri berdasarkan aspek fisik, ekonomi dan produksi, kelembagaan, sosial dan lingkungan. Adapun nilai kemandirian SKPT Natuna sebagaimana grafik dibawah ini :

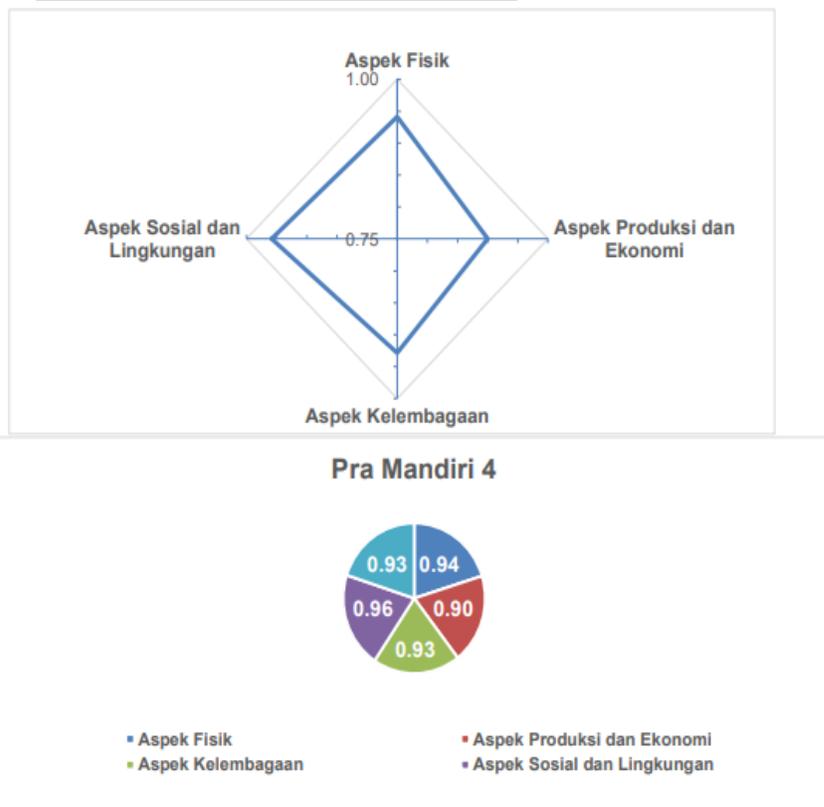
PENILAIAN STATUS PENGELOLAAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) MANDIRI

Nama Lokasi : **KABUPATEN NATUNA**
 Periode : **Desember 2020**

Status	Nilai	Kategori
Pra Mandiri 1	0.25	Pra Persiapan
Pra Mandiri 2	≥ 0.25 dan < 0.5	Persiapan
Pra Mandiri 3	≥ 0.5 dan < 0.75	Terbangun
Pra Mandiri 4	≥ 0.75 dan < 1	Terkelola
Mandiri	1	Terkelola Efektif

STATUS SKPT : Pra Mandiri 4

Kriteria	Pra Mandiri 4
Aspek Fisik	0.94
Aspek Produksi dan Ekonomi	0.90
Aspek Kelembagaan	0.93
Aspek Sosial dan Lingkungan	0.96
Nilai Rata-Rata	0.93



Gambar. 3

Berdasarkan gambar diatas hasil survei kemandirian SKPT pada aspek fisik pada tahun 2019 mencapai 0,94 begitupun pada tahun 2020, aspek fisik masih tetap sama diangka 0,94. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 sarana fisik yang telah digunakan dengan baik, dimana sudah terdapat aktivitas penggunaan sarana yang disediakan. Untuk aspek produksi dan ekonomi pada tahun 2019 mencapai 0,85 naik menjadi 0,90 pada tahun 2020. Hal ini didukung dengan

meningkatkan skala penggunaan sarana seperti dermaga, ice flake, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Integrated Cold Storage dibanding tahun sebelumnya.

Pada aspek kelembagaan, nilai masih tetap sama di angka 0,93 dimana kondisi kelembagaan PP Selat Lampa belum menjadi satker mandiri yang telah mempunyai Kepala Pelabuhan Perikanan, DIPA Satker. Lebih lanjut pada aspek sosial dan lingkungan, nilainya juga masih sama dengan tahun 2019, yakni berkisar diangka 0,96. Pelabuhan Perikanan Natuna saat ini telah memberikan dampak dimana kegiatan di Pelabuhan telah menyerap tenaga kerja lokal seperti para pekerja pada pengolahan ikan dan gudang pembekuan yang dikelola BUMN Perum Perindo.

Secara rata – rata, 4 aspek tersebut diatas apabila dibandingkan tahun 2019 mencapai 0,91 naik menjadi 0,93 pada tahun 2020. Angka ini masuk pada skala Pra Mandiri 4 ($\geq 0,75$ dan < 1) atau dapat dikatakan terkelola.

Pelabuhan Perikanan Selat Lampa dibangun pada tahun 2015 dengan lahan reklamasi seluas 3 Ha dari target 9 Ha. Secara bertahap pembangunan lahan sampai dengan fasilitas dasar telah lengkap dari tahun 2015 – 2016. Fasilitas SKPT Natuna yang telah tersedia antara lain : Dermaga kapal >30 GT , Dermaga kapal <30 GT, Integrated Cold Storage 200 Ton, Ice Flake Machine 2 unit, Tempat Pemasaran Ikan (TPI), Gedung perbaikan alat penangkap ikan, SPBN, Jalan kawasan, Tempat ibadah mesjid, Mess pegawai, Kantor Pelabuhan Perikanan, mesin penyediaan air bersih BWRO. Sedangkan bantuan untuk masyarakat Natuna yang telah diberikan antara lain : SRD (freezer 14 unit, cool box 70 dan 36 unit, chestfreezer 18 unit, meja preparasi 18 unit) sarana pemasaran roda 4 berpendingin & roda 4 bak terbuka, paket bantuan rumput laut (E.Cottoni) 40 unit, ikan kerapu di KJA (bibit, pakan) 25 unit, paket KJA (1 unit, 8 lubang) 4 unit dan kekerangan sebanyak 5 paket, kapal 10 GT sebanyak 8 unit dan kapal 30 GT sebanyak 2 unit, alat penangkap bubu lipat ikan (72 unit), kendaraan roda 2 & kendaraan roda 6 berpendingin 1 paket, ice flake machine skala kecil 5 paket, kapal 5 GT sebanyak 50 unit, 20 GT sebanyak 5 unit dan asuransi nelayan.

Pembangunan SKPT Natuna telah memberikan dampak positif : (1) nelayan mendapat akses pemasaran hasil tangkapan ikan melalui BUMN Perindo yang berlokasi di PP Selat Lampa yang mampu membeli ikan dengan harga yang lebih kompetitif, (2) peningkatan volume produksi perikanan tangkap Kabupaten Natuna, (3) peningkatan serapan tenaga kerja di kawasan PP Selat Lampa dan, (4) tumbuhnya koperasi nelayan perikanan.

Perindo melakukan pembelian semua ikan yang didaratkan di SKPT Natuna (PP Selat Lampa) yang merupakan mitra usaha.

➤ Dampak keberhasilan dari pembangunan SKPT Natuna diantaranya sbb :

- Nelayan mendapat akses pemasaran hasil tangkapan ikan melalui BUMN Perindo yang berlokasi di PP Selat Lampa yang mampu membeli ikan dengan harga yang lebih kompetitif ;
- Peningkatan volume produksi perikanan tangkap Kabupaten Natuna ;

- Peningkatan serapan tenaga kerja di kawasan PP Selat Lampa ;
 - Terdapat peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 3,5% per tahun pertumbuhan ekonomi saat ini sudah mencapai 5,8% per tahun.
 - Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja khususnya di PP Selat Lampa, permintaan logistik kapal, meningkatnya minat investor dalam berinvestasi industri pengolahan, meningkatnya harga ikan tangkapan nelayan.
- Kegiatan pendukung :
- Adanya kunjungan kerja Presiden RI ke Kabupaten Natuna, Prov. Kepulauan Riau Tgl. 7-10 Januari 2020

3.1.4 Tata kelola Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang baik

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 7 (Tujuh) indikator yakni, (1) Indeks profesionalitas ASN Dit. Perizinan dan Kenelayanan (2) Nilai Rekonsiliasi kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan (3) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang dokumen tindak lanjutnya sudah dilengkapi dan disampaikan (4) Jumlah inovasi pelayanan publik Dit. Perizinan dan Kenelayanan (5) Persentase unit kerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar (6) Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan dan (7) Nilai IKPA Dit. Perizinan dan Kenelayanan

1. Indeks Profesionalitas ASN Dit. Perizinan dan Kenelayanan

IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatan (Permenpan dan RB Nomor 38 Tahun 2018. Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 komponen yaitu :

- **Kualifikasi**, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
 - **Kompetensi**, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;
 - **Kinerja**, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi : Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
 - **Disiplin Pegawai**, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi : Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin (Ringan, Sedang, Berat).
- Adapun capaian IP ASN Dit. Perizinan dan Kenelayanan **Tahun 2020** adalah **80,13** atau **111,29%** dari target tahunan.

Tabel 10. Indeks Profesionalitas ASN Dit. Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2020

Nama IKU	Target Tahun 2020	Realisasi tahun 2020	% Capaian
Indeks Profesionalitas ASN Dit. Perizinan dan Kenelayanan	72	80,13	111,29

Tabel 11. Perbandingan target dan capaian IP ASN Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Nama IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Capaian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2016
Indeks Profesionalitas ASN Dit. Perizinan dan Kenelayanan	72	80,13	111,29	79,15	-	-	-

2. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan

SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan (perencanaan strategik, perencanaan kerja). Adapun tujuan rekonsiliasi itu sendiri adalah (1) meningkatkan aspek pelaporan kinerja SAKIP, (2) meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP, (3) memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja. Output rekonsiliasi menggambarkan nilai kepatuhan, kesesuaian dan ketercapaian masing masing unit kerja.

Adapun nilai capaian nilai rekonsiliasi kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2020 adalah 86,70 atau sebesar 102% dari target tahunan.

Tabel 12. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Nama IKU	Target Tahun 2020	Realisasi tahun 2020	% Capaian
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan	85	86,70	102

Nilai capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena indikator ini baru ada pada tahun 2020.

3. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang dokumen tindak lanjutnya sudah dilengkapi dan disampaikan

Merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Dit. Perizinan dan Kenelayanan berdasarkan LHP yang terbit pada triwulan IV Tahun 2019 s/d triwulan III Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan / atau tuntas) oleh Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang menjadi objek pengawasan. Adapun capaian Tahun 2020 adalah 129,63 atau 129,63% dari target tahunan.

Tabel. 13 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang dokumen tindak lanjutnya sudah dilengkapi dan disampaikan.

Nama IKU	Target Tahun 2020	Realisasi tahun 2020	% Capaian
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang dokumen tindak lanjutnya sudah dilengkapi dan disampaikan	100	129,63	129,63

Capaian ini juga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena indikator ini baru ada di tahun anggaran 2020. Sehingga tahun sebelumnya tidak ada capaian.

4. Jumlah inovasi pelayanan publik Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan / atau adaptasi / modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (PermenPAN dan RB No.30 Tahun 2014). Adapun kriteria inisiatif inovasi meliputi :

- Apabila memberikan perbaikan pelayanan publik
- Apabila memberikan manfaat bagi masyarakat
- Apabila dapat dan / atau sudah direplikasi (role model)
- Bersifat berkelanjutan

Dalam rangka percepatan proses izin usaha perikanan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan meluncurkan suatu inovasi pelayanan publik berupa aplikasi **one day service** yang diberi nama **Sistem Informasi Layanan Cepat** atau yang disingkat dengan "**SILAT**" , yaitu suatu sistem informasi yang memberikan pelayanan perizinan secara online, sehingga dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Aplikasi ini sendiri di launching pada tanggal 30 Desember 2019. Dengan inovasi layanan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat .

Tabel 14. Jumlah inovasi pelayanan publik Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Nama IKU	Target Tahun 2020	Realisasi tahun 2020	% Capaian
Jumlah Inovasi pelayanan Publik Dit. Perizinan dan Kenelayanan	1	1	100

Tabel 15. Perbandingan capaian jumlah inovasi pelayanan publik Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Nama IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Capaian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2016
Jumlah inovasi pelayanan publik Dit. Perizinan dan Kenelayanan	1	1	100	-	1	-	-

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2019, nilai capaian inovasi pelayanan tidak ada karena, pada tahun 2019 memang indikator ini tidak ada meskipun pada tahun sebelumnya (2018) indikator ini masuk pada IKU Dit. Perizinan dan Kenelayanan.

- 5. Persentase Unit Kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar**
Sistem Manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penerapan manajemen pengetahuan lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan dilakukan melalui 3 komponen yakni : (1) Tingkat pemenuhan dokumen kinerja (2) Tingkat keikutsertaan pejabat dan staf dalam aplikasi Bitrix24 KKP dan (3) Tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP.

Adapun capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tahun 2020 adalah **91,50** atau **111,59%** dari target tahunan.

Tabel 16. Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Nama IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Capaian
Persentase unit kerja yang menerpakan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	82	91,50	111,59

Tabel 17. Perbandingan capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Nama IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Capaian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2016
Persentase Unit Kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar	82	91,50	111.59	81,02	73,21	68	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar mengalami peningkatan dari beberapa tahun sebelumnya.

- 6. Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan** Merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan / efektifitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan. Dimana tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Adapun kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
- Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
 - Memiliki anggaran yang besar
 - Mendukung secara langsung target kinerja KKP
 - Mendukung capaian prioritas nasional
 - Merupakan arahan direktif Presiden, dan
 - Pertimbangan lainnya yang relevan

Adapun kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan diantaranya **Bantuan Premi Asuransi Nelayan**. Namun ditahun 2020 kegiatan ini ditiadakan sementara. Hal ini terkait pengalihan anggaran untuk percepatan penanganan covid 19 yang merupakan bencana nasional yang membutuhkan penanganan yang segera dan cepat. Tidak hanya kegiatan asuransi nelayan, kegiatan **fasilitasi kawasan sentra/kampung nelayan** pun menjadi imbas dari adanya pemotongan anggaran Dit. Perizinan dan Kenelayanan. Kegiatan lainnya yang menjadi kegiatan prioritas adalah **SEHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah)**. **diversifikasi usaha**,

- a. **Bantuan Premi Asuransi Nelayan** , merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada nelayan demi menjamin keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. Mengingat resiko yang dihadapi nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Adapun target untuk tahun 2020 adalah sebesar 150.000 orang nelayan . sehubungan dengan adanya pemotongan anggaran terkait kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19, realisasi capaian

dari kegiatan BPAN ini tidak ada. Sedangkan untuk fasilitasi nelayan yang terlindungi (BPAN Mandiri) dengan target 20.000 orang nelayan memiliki capaian sebesar 40.749 orang nelayan atau sebesar 203,7 % dari target tahun 2020. Adapun kegiatan pendukung meliputi : **(1) sosialisasi dan gerai kepesertaan nelayan pada asuransi nelayan mandiri** dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, penyuluh perikanan serta bekerja sama dengan perusahaan asuransi (PT. Jasindo dan BPJS Ketenaga kerjaan) di 11 lokasi yaitu Kab. Tegal, Kab. Cilacap, Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kota Serang, Kab. Sambas, Kab. Pandeglang, Kab. Jembrana, Kab. Banyuwangi, Kab. Bekasi dan Kab. Tapanuli Tengah. **(2) pendataan dan pendaftaran KUSUKA nelayan .**

- b. Keluarga nelayan yang difasilitasi kegiatan Diversifikasi usahanya**, merupakan program pemberdayaan nelayan yang bertujuan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang dimiliki baik oleh nelayan maupun keluarganya. Sehingga dapat terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan perikanan tangkap. Adapun target tahun 2020 setelah refocusing anggaran sebesar 1.000 RTP dengan capaian sebanyak 1.946 RTP atau sebesar 194,6% dari target. Kegiatan dilaksanakan di 18 lokasi yaitu : Prov. Lampung, Kab. Cirebon, Karawang, Sukabumi, Subang, Bekasi (Jawa Barat), Kab. Serang, Kota Serang, Kab. Pandeglang (Banten), Kab. Pati, Tegal, Rembang, Demak (Jawa Tengah), Kab. Pemekasan, Sumenep, Sampang (Jawa Timur), Kab. Bone Sulawesi Selatan, Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.
- c. Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SEHAT) ,** merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan/legalisasi aset dan penggunaan/pemanfaatan aset melalui nota kesepahaman dengan kementerian lain dalam bentuk pemberdayaan hak atas tanah. Melalui kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas aset yang dimiliki (berupa bidang tanah) agar dapat dijadikan agunan dalam memperoleh kredit dari perbankan/lembaga keuangan lainnya. Adapun target tahun 2020 setelah kebijakan refocusing anggaran adalah sebanyak 2.500 bidang tanah dengan capaian sebesar 10.012 bidang tanah atau sebesar 400% dari target.
- d. Fasilitasi Kawasan Sentra/Kampung Nelayan ,** merupakan suatu lingkungan permukiman masyarakat yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan, baik diperaian laut atau diperaian umum daratan. Fasilitasi kawasan sentra/kampung nelayan yang tertata dan dilaksanakan untuk menjembatani tertatanya kawasan/lingkungan kampung nelayan yang bersih, sehat dan nyaman serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan melalui kerjasama (CSR/PKBL) dengan pihak BUMN dan swasta. Adapun target tahun 2020 setelah kebijakan refofusing anggaran sebanyak 10 kawasan dengan capaian 4 kawasan .

Adapun capaian dari tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan tahun 2020 adalah sebesar **92,93** atau sebesar **120 %** dari target tahunan.

Tabel 18. Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Nama IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Capaian
Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan	70	92,93	132,76

Karena Indikator ini belum ada ditahun tahun sebelumnya dan merupakan Indikator Baru, maka Indikator ini belum dapat dibandingkan.

7. Nilai IKPA Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian / lembaga dalam rangka ketahanan fiscal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 Indikator pelaksanaan anggaran, yaitu Revisi DIPA, halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon Lpj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi penyampaian SPM, Dan Pagu Minus.

- **Revisi DIPA**, semakin rendah angka persentase revisi DIPA yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran
- **Deviasi RPD** (Halaman III DIPA), semakin rendah persentase deviasi (angka absolut) yang diperoleh, maka semakin baik kualitas rencana penarikan dan kinerja realisasi anggaran K/L
- **Pengelolaan UP**, semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja pengelolaan UP
- **Lpj Bendahara**, semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian Lpj Bendahara
- **Data Kontrak**, semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian data kontrak
- **Penyelesaian tagihan**, semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyelesaian tagihannya
- **Penyerapan Anggaran**, penyerapan anggaran yang nilainya mencapai target, maka nilainya semakin baik
- **Retur SP2D**, semakin rendah persentase retur SP2D yang diperoleh, maka semakin baik kualitas SPM yang diajukan ke KPPN
- **Perncanaan Kas**, semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja kesesuaian pengajuan SPM dengan Renkas/ RPD harian
- **Pengembalian SPM**, semakin rendah % kesalahan, maka semakin baik kualitas SPM yang disampaikan ke KPPN

- **Dispensasi SPM**, semakin rendah % pengajuan dispensasi SPM, maka semakin baik kinerja indikator dspensasi pengajuan SPM
 - **Pagu Minus**, semakin rendah angka persentase pagu minus yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran belanja pegawai pada K/L tersebut.
- Adapun nilai IKPA yang diperoleh Dit. Perizinan dan Kenelayanan pada tahun 2020 adalah 75,92 atau 86,27% dari target tahunan.

Tabel. 19 Nilai IKPA Dit. Perizinan dan Kenelayanan

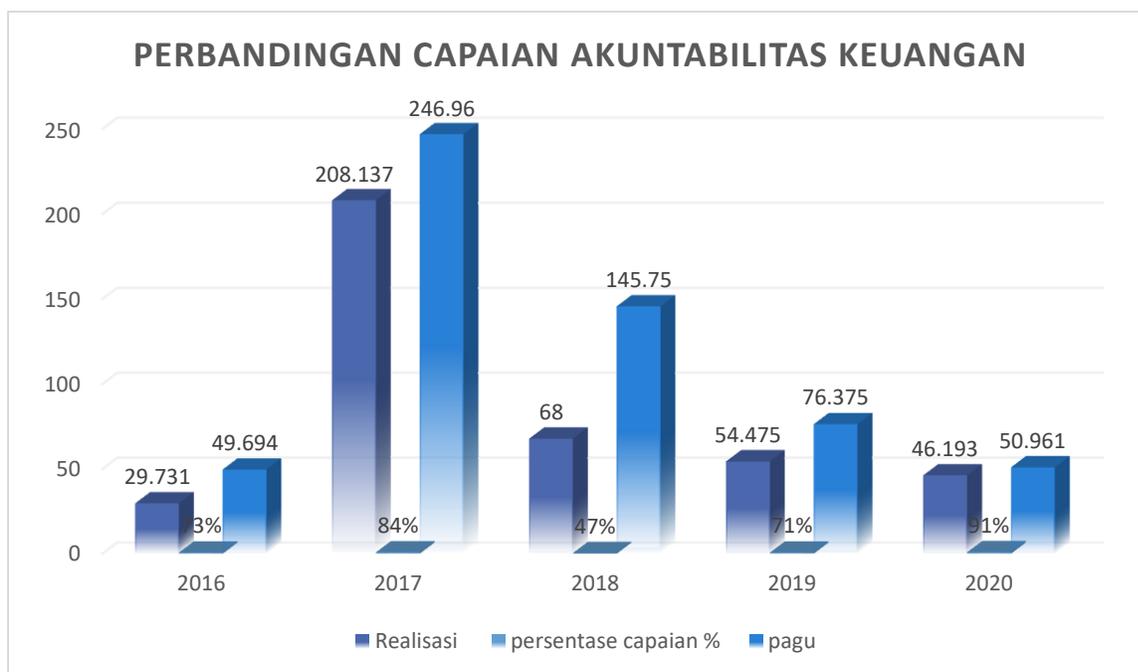
Nama IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Capaian
Nilai IKPA Dit. Perizinan dan Kenelayanan	88	75,92	86,27

Tabel. 20 Perbandingan Nila IKPA Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Nama IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Capaian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2016
Nilai IKPA Dit. Perizinan dan Kenelayanan	88	75,92	86,27	80,58			

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 54.663.960.000,-** sesuai dengan yang tercantum pada DIPA, Nomor : SP DIPA-032.03.1.465023/2020 tanggal 23 Desember 2020. Kemudian pada tanggal 29 April tahun 2020, ada pemotongan anggaran sehingga anggaran turun menjadi **Rp. 20.179.410.000,-** hal ini diakibatkan karena adanya pemotongan anggaran dari pemerintah, yang mana anggaran nya di peruntukkan untuk percepatan penanganan wabah Covid-19/. Kemudian pada Tanggal 14 Agustus 2020, terdapat penambahan dana stimulus sebesar **Rp. 24.500.000.000,-** sehingga total anggaran bertambah menjadi **Rp. 44.679.410.000,-** . Pada Tanggal 4 November 2020, anggaran direvisi lagi menjadi **Rp.47.267.410.000,-** . Kemudian pada Tanggal 30 Desember 2020, terdapat penambahan dana hibah sebesar **Rp. 3.693.792.000,-** sehingga total anggaran terakhir sebesar **Rp. 50.961.202.000,-** . Adapun realisasi anggaran tahun 2020 ini sebesar **Rp. 46.193.424.356** atau mencapai **90,64%** dari total anggaran tahun 2020. Capaian realisasi anggaran tahun ini bisa dibilang meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai **71,33%** dari pagu. Adapun perbandingan capaian realisasi anggaran tahun 2020 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut.



Gambar 4

Tabel 21. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020, Berdasarkan jenis kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Alokasi izin yang diberikan terhadap peluang alokasi usaha penangkapan ikan yang tersedia	1.613.545.000,-	1.370.318.750,-	84,93
2.	Realisasi kapal terhadap alokasi dalam SIUP	2.682.248.000,-	2.310.634.683,-	86,15
3.	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	9.135.182.000,-	5.467.349.213,-	59,85
4.	Bantuan premi asuransi nelayan yang tersalurkan	183.440.000,-	183.438.950,-	100
5.	Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap	2.157.320.000,-	2.060.579.888,-	95,52
8.	Keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya	2.946.800.000,-	2.908.584.530,-	98,70
9.	Sertifikat Hak atas tanah nelayan yang difasilitasi sertifikasinya	575.280.000,-	521.912.700,-	90,72
10.	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	1.014.290.000,-	917.354.671,-	90,44

11.	Kawasan Sentra / Kampung nelayan yang difasilitasi penataanya	281.330.000,-	235.187.510,-	83,60
12.	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri	1.104.990.000,-	1.058.011.580,-	95,75
13.	Fasilitas nelayan yang terlindungi	858.425.000,-	827.037.792,-	96,34
14.	Sarana pengembangan usaha nelayan yang disalurkan	24.500.000.000,-	24.444.192.089,-	99,77
15.	Saran dan prasarana Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna (Hibah JICA)	3.693.792.000,-	3.693.792.000,-	100
16	Layanan Perkantoran	214.560.000,-	195.030.000,-	90,90
	TOTAL	50.961.202.000,-	46.193.424.356,-	90,64

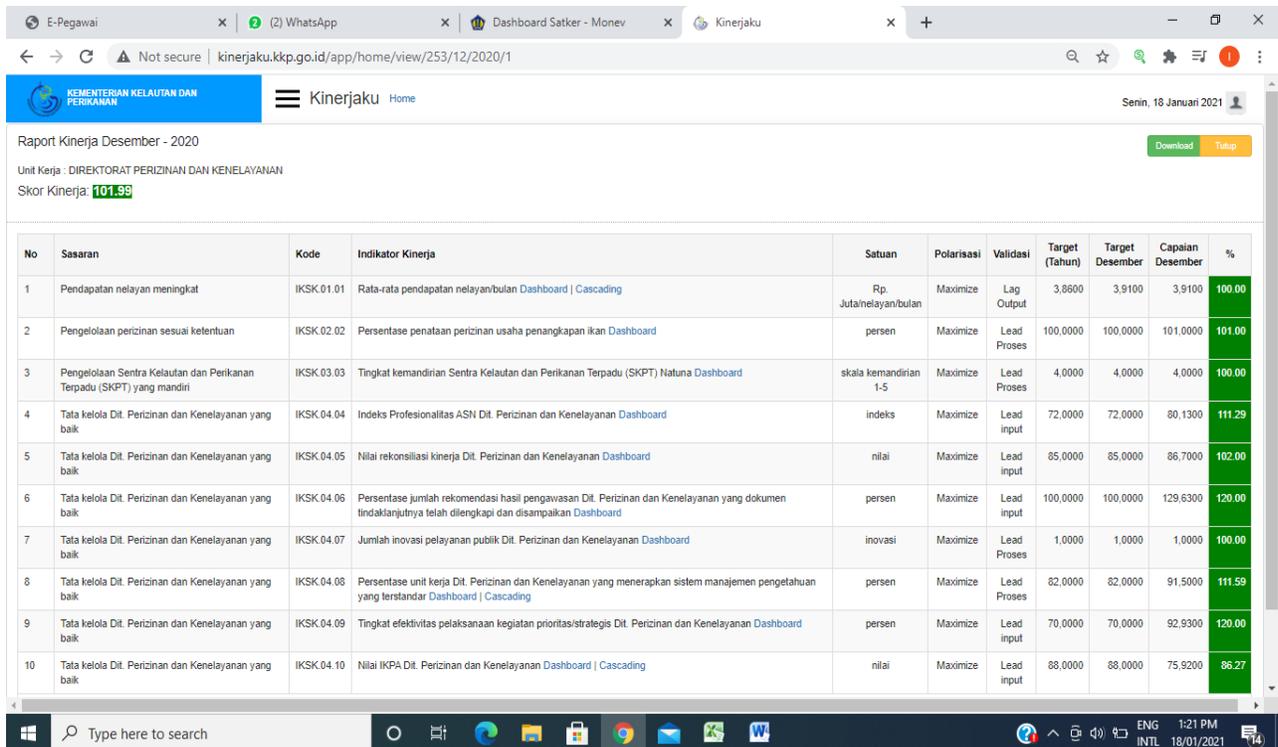
Tabel 22. Alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Jenis Belanja	Alokasi (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Belanja Barang	50.961.202.000	46.193.424.356	90,64
2.	Belanja Modal	-	-	-
	TOTAL	50.961.202.000	46.193.424.356	90,64

I. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2020 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Direktorat Perizinan dan Kenelayanan sebesar **101,99** persen sebagaimana pda Gambar berikut ini.



No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Validasi	Target (Tahun)	Target Desember	Capaian Desember	%
1	Pendapatan nelayan meningkat	IKSK.01.01	Rata-rata pendapatan nelayan/bulan Dashboard Cascading	Rp. Juta/nelayan/bulan	Maximize	Lag Output	3,8600	3,9100	3,9100	100.00
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	IKSK.02.02	Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan Dashboard	persen	Maximize	Lead Proses	100,0000	100,0000	101,0000	101.00
3	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	IKSK.03.03	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna Dashboard	skala kemandirian 1-5	Maximize	Lead Proses	4,0000	4,0000	4,0000	100.00
4	Tata kelola Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang baik	IKSK.04.04	Indeks Profesionalitas ASN Dit. Perizinan dan Kenelayanan Dashboard	indeks	Maximize	Lead input	72,0000	72,0000	80,1300	111.29
5	Tata kelola Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang baik	IKSK.04.05	Nilai rekonsiliasi kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan Dashboard	nilai	Maximize	Lead input	85,0000	85,0000	86,7000	102.00
6	Tata kelola Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang baik	IKSK.04.06	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Dashboard	persen	Maximize	Lead input	100,0000	100,0000	129,6300	120.00
7	Tata kelola Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang baik	IKSK.04.07	Jumlah inovasi pelayanan publik Dit. Perizinan dan Kenelayanan Dashboard	inovasi	Maximize	Lead Proses	1,0000	1,0000	1,0000	100.00
8	Tata kelola Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang baik	IKSK.04.08	Persentase unit kerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Dashboard Cascading	persen	Maximize	Lead Proses	82,0000	82,0000	91,5000	111.59
9	Tata kelola Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang baik	IKSK.04.09	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan Dashboard	persen	Maximize	Lead input	70,0000	70,0000	92,9300	120.00
10	Tata kelola Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang baik	IKSK.04.10	Nilai IKPA Dit. Perizinan dan Kenelayanan Dashboard Cascading	nilai	Maximize	Lead input	88,0000	88,0000	75,9200	86.27

Gambar 5

Dashboard KINERJAKU Capaian Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2020

Pencapaian NPSS tersebut didukung oleh pencapaian target indikator kinerja yang mencapai 100 persen atau lebih (dari target tahunan) oleh 9 indikator sebagai berikut :

1. Rata-rata pendapatan nelayan/bulan (100%)
2. Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan (101%)
3. Tingkat Kemandirian SKPT Natuna (100%)
4. Indeks Profesionalitas ASN Dit. Perizinan dan Kenelayanan (111,29%)

5. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayan (102%)
6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Dit.Perizinan dan Kenelayan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (129,63%)
7. Jumlah inovasi pelayanan publik Dit. Perizinan dan Kenelayan (100%)
8. Persentase unit kerja Dit. Perizinan dan Kenelayan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar (111,59%)
9. Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayan (132,76%)

Sedangkan indikator yang capaiannya dibawah 100 adalah :

1. Nilai IKPA Dit. Perizinan dan Kenelayan (86,27%)

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab III, hal – hal yang dapat disarankan untuk perbaikan pengelolaan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator kinerja yang tidak mencapai target, antara lain :
 - a. Direktorat Perizinan dan Kenelayan agar melakukan formulasi ulang cara penetapan target dan pengukuran capaian indikator
 - b. Direktorat Perizinan dan Kenelayan agar mengidentifikasi penyebab – penyebab tidak tercapainya target dan menyusun rencana aksi percepatan kegiatan .
2. Hal – hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayan adalah sebagai berikut :
 - a. Perlu ditingkatkan kepedulian, monitoring dan evaluasi secara berkala oleh masing – masing pimpinan unit kerja mengingat fokus utama saat ini adalah beberapa kegiatan prioritas masing – masing unit kerja;
 - b. Perlunya penetapan SOP Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja melalui Surat Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja yang tetap dan tidak berubah-ubah;
 - c. Perlu diupayakan proses percepatan validasi data statistik perikanan tangkap sehingga data capaian yang digunakan adalah data yang handal dan dapat dipercaya;

DATA DUKUNG & DOKUMEN KEGIATAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

MEMORANDUM

Nomor: 147/D4.TK/TU/I/2021

Yth : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Perizinan dan Kenelayanan
Hal : Penyampaian Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU)
Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 15 Januari 2021

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.331/DJPT/TU.140.S2/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 perihal Penyusunan Capaian Indikator dan Laporan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan hasil capaian dan data dukung indikator kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, mohon arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ridwan Mulyana

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2. Koordinator Kelompok Program, Sesditjen PT

Lampiran 1.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN 2020

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
1.	Pendapatan nelayan meningkat	1	Rata-rata pendapatan nelayan/bulan (Rp. Juta/nelayan/bulan)	3,86	4,06	105,18 %
2.	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	2	Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan (persen)	100	101	101,00 %
3.	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	3	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna (skala kemandirian 1-5)	4	4	100,00 %
4.	Tata kelola Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang baik	4	Indeks Profesionalitas ASN Dit. Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	72	80,13	111,29 %
		5	Nilai rekonsiliasi kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	85	86,70	102,00 %
		6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	100	129,63	129,63 %
		7	Jumlah inovasi pelayanan publik Dit. Perizinan dan Kenelayanan (inovasi)	1	1	100,00 %
		8	Persentase unit kerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	82	91,50	111,59 %
		9	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan (persen)	70	92,93	132,76 %
		10	Nilai IKPA Dit. Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	88	75,92	86,27%

Jakarta, 15 Januari 2021
Direktur Perizinan dan Kenelayanan


Ridwan Mulyana

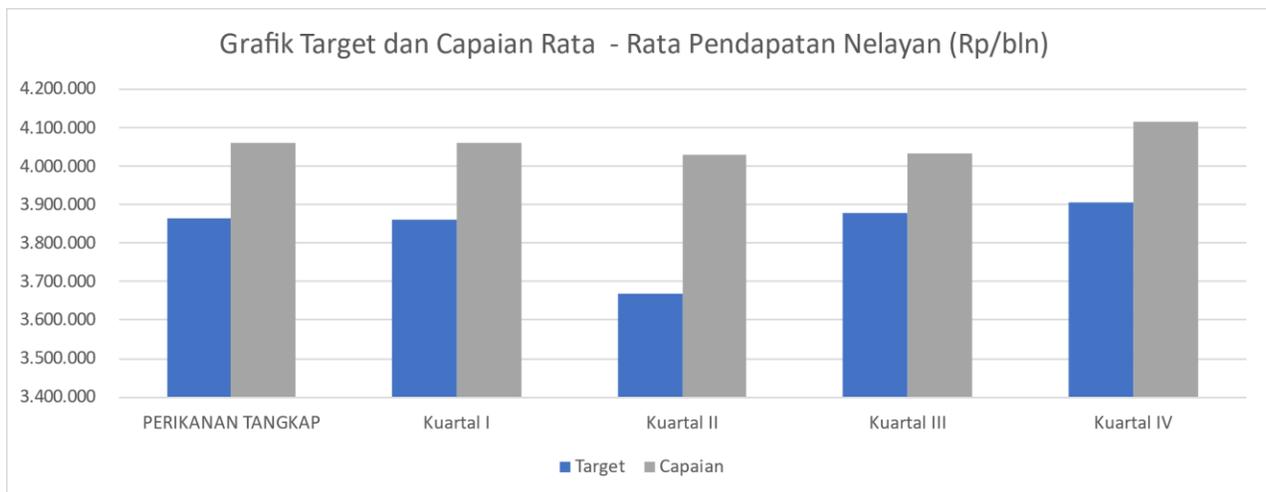
Lampiran 2.

DATA DUKUNG CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN TAHUN 2020

a. Indikator Kinerja 1: Rata-rata pendapatan nelayan/bulan (Rp. Juta/nelayan/bulan)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
1.	Pendapatan nelayan meningkat	1	Rata-rata pendapatan nelayan/bulan (Rp. Juta/nelayan/bulan)	3,86	4,06	105,18 %

RINCIAN	Target	Capaian
PERIKANAN TANGKAP	3.864.000	4.060.000
Kuartal I	3.862.000	4.062.000
Kuartal II	3.670.000	4.030.000
Kuartal III	3.877.000	4.032.000
Kuartal IV	3.905.000	4.116.000
LAUT	4.159.000	4.305.000
Kuartal I	4.059.000	4.288.000
Kuartal II	3.882.000	4.283.000
Kuartal III	4.126.000	4.296.000
Kuartal IV	4.122.000	4.356.000
PERAIRAN UMUM	2.215.000	2.688.000
Kuartal I	2.762.000	2.797.000
Kuartal II	2.486.000	2.615.000
Kuartal III	2.483.000	2.563.000
Kuartal IV	2.692.000	2.776.000



b. Indikator Kinerja 2: Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
2.	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	2	Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan (persen)	100	101	101,00%

No	Kegiatan/Kriteria	2020		Persentase
		Target	Realisasi	
Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan		100		101%
1.	Jumlah alokasi izin yang diterbitkan	9.500	9.187	97%
2.	Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP (SIPI/SKPI)	5.200	5.485	105%
3.	Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah	34	34	100%



**JUMLAH PROVINSI YANG MENINGTEGRASIKAN SISTEM PERIZINAN
PUSAT-DAERAH (PROVINSI) TRIWULAN IV 2020**

NO.	NAMA PROVINSI	JUMLAH			
		SIUP	SIPI	SIKPI	BPKP
1	BALI	108	139	8	78
2	BANTEN	107	46	6	156
3	BENGKULU	26	-	-	-
4	DI. YOGYAKARTA	35	12	-	200
5	DKI. JAKARTA	825	1.444	13	21
6	GORONTALO	200	178	-	28
7	JAMBI	38	13	4	2
8	JAWA BARAT	468	567	1	3.365
9	JAWA TENGAH	1.202	1.839	17	2.632
10	JAWA TIMUR	1.062	524	52	1.959
11	KALIMANTAN BARAT	119	315	30	1
12	KALIMANTAN SELATAN	321	1	10	1.812
13	KALIMANTAN TENGAH	48	-	-	-
14	KALIMANTAN TIMUR	201	108	66	400
15	KALIMANTAN UTARA	6	1	-	-
16	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	140	197	42	253
17	KEPULAUAN RIAU	43	54	1	4.703
18	LAMPUNG	186	141	74	209
19	MALUKU	172	233	15	-
20	MALUKU UTARA	27	7	-	567
21	NUSA TENGGARA BARAT	296	202	100	644
22	NUSA TENGGARA TIMUR	21	1	-	1.203
23	PAPUA	464	537	8	128
24	PAPUA BARAT	304	287	79	170
25	RIAU	155	132	35	197
26	SULAWESI BARAT	208	188	-	115
27	SULAWESI SELATAN	1.925	1.829	162	233
28	SULAWESI TENGAH	288	248	9	1
29	SULAWESI TENGGARA	497	395	14	853
30	SULAWESI UTARA	588	619	7	534
31	SUMATERA BARAT	373	377	3	10
32	SUMATERA SELATAN	24	35	4	1
33	SUMATERA UTARA	1.035	941	16	393
34	ACEH	*)			
TOTAL		11.512	11.610	776	20.868

Jumlah Provinsi 34 Provinsi

Keterangan :

*)

Adanya pemberian kewenangan khusus dalam penerbitan izin usaha perikanan yang berlaku di Provinsi Aceh melalui Qanun Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan dimana sesuai ketentuan pasal 43 tentang kewenangan pemberian izin diatur bahwa Gubernur Aceh berwenang antara lain memberikan: (a) SIUP pada usaha perikanan laut Aceh di atas 4 mil laut, (b) SIPI untuk kapal yang berbobot di atas 30 GT, dan (c) SIKPI untuk kapal yang berbobot di atas 10 GT. Sementara aplikasi SIMKADA mengakomodir penerbitan SIUP/ SIPI/ SIKPI/BPKP bagi kapal perikanan berukuran ≤ 30 GT. Proses perizinan di Provinsi Aceh menggunakan aplikasi SICANTIK, namun penginputan database melalui SIMKADA juga tetap dilakukan.

c. Indikator Kinerja 3: Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna (skala kemandirian 1-5)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
3.	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	3	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna (skala kemandirian 1-5)	4	4	100,00%

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

MEMORANDUM

Nomor : 13 / Dik. TK / SKPT / 1 / 2021

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 Dari : Direktur Perizinan dan Kenyelayanan
 Hal : Status Kemandirian SKPT Natuna Tahun 2020
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Tanggal : 4 Januari 2021

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna 2020 dan merujuk pada Indikator Kinerja Utama Pembangunan SKPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 yang ditetapkan, dapat kami sampaikan bahwa sesuai hasil penilaian tingkat kemandirian SKPT, SKPT Natuna 2020 berada pada Skala Pra Mandiri Tingkat 4. Selanjutnya, berikut terlampir data dukung penilaian kemandirian SKPT Natuna sebagai bahan referensi lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ridwan Mulyana
Ridwan Mulyana

Tembusan:
Pit. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

PENILAIAN STATUS PENGELOLAAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) MANDIRI

Nama Lokasi : **KABUPATEN NATUNA**
Periode : Desember 2020

Status	Nilai	Kategori
Pra Mandiri 1	0.25	Pra Persiapan
Pra Mandiri 2	≥ 0.25 dan < 0.5	Persiapan
Pra Mandiri 3	≥ 0.5 dan < 0.75	Terbangun
Pra Mandiri 4	≥ 0.75 dan < 1	Terkelola
Mandiri	1	Terkelola Efektif

STATUS SKPT : Pra Mandiri 4

Kriteria	Pra Mandiri 4
Aspek Fisik	0.94
Aspek Produksi dan Ekonomi	0.90
Aspek Kelembagaan	0.93
Aspek Sosial dan Lingkungan	0.96
Nilai Rata-Rata	0.93

d. Indikator Kinerja 4: Indeks Profesionalitas ASN Dit. Perizinan dan Kenyelayanan (indeks)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
4.	Tata kelola Dit. Perizinan dan Kenyelayanan yang baik	4	Indeks Profesionalitas ASN Dit. Perizinan dan Kenyelayanan (indeks)	72	80,13	111,29%

IP-ASN 2020

Dashboard **Eselon** Pegawai Mengenai IP-ASN

Filter

Kembali ke eselon 1

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP	95	13.94	55.76 %	26.55	66.38 %	24.89	82.97 %	4.96	99.2 %	70.34	RENDAH
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN	54	15.2	60.8 %	26.39	65.98 %	25.09	83.63 %	5	100 %	71.69	SEDANG
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	66	14.88	59.52 %	8.37	20.93 %	25	83.33 %	4.91	98.2 %	53.16	SANGAT RENDAH
4	DIREKTORAT KEPSELABUHANAN PERIKANAN	53	15.15	60.6 %	11.65	29.13 %	25	83.33 %	4.85	97 %	56.65	SANGAT RENDAH
5	DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	74	14.53	58.12 %	35.64	89.1 %	25	83.33 %	4.96	99.2 %	80.13	SEDANG

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

MEMORANDUM

Nomor: M.33/DJPT/KP.560.S3/I/2021

Yth : 1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
2. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
3. Direktur Kepelabuhanan Perikanan
4. Direktur Perizinan dan Kenelayanan
5. Koordinator Kelompok Kerja Lingkup Sekretariat

Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran : Satu Berkas

Hal : **Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN DJPT Tahun 2020**

Tanggal : 12 Januari 2021

Dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait dengan pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Target IKU IP ASN Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 adalah 72 (tingkat profesionalitas ASN : Sedang) dan sampai dengan batas waktu penginputan data dukung pada bulan Januari Tahun 2021, capaian IKU IP ASN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah 68.25 (tingkat profesionalitas ASN : Rendah). Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kualifikasi Pendidikan ASN secara umum dan kurangnya dukungan dalam penginputan data dukung untuk kompetensi pegawai seperti Diklat 20 JP dan Seminar;
- Sehubungan dengan hal tersebut, maka langkah – langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 guna meningkatkan capaian IKU UP ASN ini adalah sebagai berikut :
 - Melakukan upaya – upaya guna meningkatkan keinginan pegawai untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang lebih tinggi;
 - Melakukan kegiatan – kegiatan yang sifatnya dapat meningkatkan kapasitas SDM seperti Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan minimal 20 JP, dan *inhouse training*.
- Adapun target IKU IP ASN Tahun 2021 adalah sebesar 73, dan pengukuran akan dilakukan secara periodik per triwulanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih



Yuladi

Tembusan :
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran :

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 20)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP	95	13.94	55.76 %	26.55	66.38 %	24.89	82.97 %	4.96	99.2 %	70.34	RENDAH
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN	54	15.2	60.8 %	26.39	65.98 %	25.09	83.63 %	5	100 %	71.69	SEDANG
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	66	14.88	59.52 %	8.37	20.93 %	25	83.33 %	4.91	98.2 %	53.16	SANGAT RENDAH
4	DIREKTORAT KEPELABUHAN PERIKANAN	53	15.15	60.6 %	11.65	29.13 %	25	83.33 %	4.85	97 %	56.65	SANGAT RENDAH
5	DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	74	14.53	58.12 %	35.64	89.1 %	25	83.33 %	4.96	99.2 %	80.13	SEDANG
6	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	84	13.7	54.8 %	35.18	87.95 %	25	83.33 %	4.93	98.6 %	78.81	SEDANG
7	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA	52	12.33	49.32 %	25.29	63.22 %	23.27	77.57 %	4.88	97.6 %	65.77	RENDAH
8	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	62	12.82	51.28 %	24.4	61 %	23.84	79.47 %	5	100 %	66.06	RENDAH
9	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	58	9.05	36.2 %	21.72	54.3 %	25	83.33 %	4.9	98 %	60.67	SANGAT RENDAH
10	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	47	10.98	43.92 %	18.99	47.47 %	25.11	83.7 %	4.91	98.2 %	59.99	SANGAT RENDAH
11	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	55	11.31	45.24 %	19.18	47.95 %	24.64	82.13 %	4.95	99 %	60.07	SANGAT RENDAH
12	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	31	13.26	53.04 %	28.39	70.97 %	25	83.33 %	5	100 %	71.65	SEDANG
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	42	10.12	40.48 %	32.08	80.2 %	25	83.33 %	5	100 %	72.2	SEDANG
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	54	12.19	48.76 %	33.75	84.38 %	24.44	81.47 %	4.85	97 %	75.23	SEDANG
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	32	11.72	48.88 %	23.2	58 %	22.75	75.83 %	5	100 %	62.67	RENDAH
16	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	60	11.02	44.08 %	33.75	84.38 %	25	83.33 %	5	100 %	74.77	SEDANG
17	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	28	8.39	33.56 %	26.7	66.75 %	25.18	83.93 %	5	100 %	65.27	RENDAH
18	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	42	10.83	43.32 %	24.17	60.43 %	25	83.33 %	4.86	97.2 %	64.86	RENDAH
19	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	20	9	36 %	27.62	69.05 %	25	83.33 %	4.5	90 %	66.12	RENDAH
20	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	46	10.13	40.52 %	27.45	68.63 %	25	83.33 %	5	100 %	67.58	RENDAH
21	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	42	10.36	41.44 %	39.23	98.07 %	24.43	81.43 %	4.76	95.2 %	78.77	SEDANG
22	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	51	11.47	45.88 %	26.32	65.8 %	25	83.33 %	5	100 %	67.79	RENDAH
23	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN	22	9.18	36.72 %	22.61	56.53 %	24.09	80.3 %	5	100 %	60.89	SANGAT RENDAH
24	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	22	10.5	42 %	30.45	76.13 %	24.55	81.83 %	5	100 %	70.5	RENDAH
25	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	30	13.17	52.68 %	26.42	66.05 %	25	83.33 %	4.87	97.4 %	69.45	RENDAH

e. Indikator Kinerja 5: Nilai rekonsiliasi kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan (nilai)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
4.	Tata kelola Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang baik	5	Nilai rekonsiliasi kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	85	86,70	102,00%

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

MEMORANDUM

Nomor: M.19/DJPT/17/U.140.S2/1/2021

Yth. : 1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
2. Direktur Kepelabuhanan Perikanan
3. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
4. Direktur Perizinan dan Kenyelayanan
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Hal : Penyampaian Hasil Rapat Rekonsiliasi Kinerja Tahun 2020 lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Tanggal : 7 Januari 2021

Sehubungan dengan Rapat Rekonsiliasi Kinerja Tahun 2020 lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 19-23 Oktober 2020 di Padjajaran Suite Resort & Convention Hotel, bersama ini kami sampaikan hasil rekon sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi data capaian dan laporan kinerja dilakukan terhadap level 2-4 lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap antara lain:

Level 2	Level 3	Level 4
<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan 	<ul style="list-style-type: none"> Subdit Sumber Daya Ikan Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan Subdit Sumber Daya Ikan Perairan Darat 	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan Seksi Tata Kelola Sumber Daya Ikan Perairan Darat
<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Kepelabuhanan Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Subdit Pelabuhan Perikanan Samudera Subdit Pangkalan Pendaratan Ikan 	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Tata Operasional dan Kesyahbandaran Subdit PPS Seksi Identifikasi dan Pengembangan PPI
<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 	<ul style="list-style-type: none"> Subdit Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan Subdit Kapal Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Operasional Kapal Perikanan Seksi Rancang Bangun dan Standardisasi Kapal Perikanan
<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Perizinan dan Kenyelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> Subdit Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan Subdit Usaha Nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Perlindungan Nelayan Seksi Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan

• Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Level	Unit	Nilai Aspek			Total Nilai	Rata-Rata Nilai
		Kepatuhan	Kesesuaian	Ketercapaian		
2	Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	28,83	29,83	32,74	91,40	53,43
3	Subdit Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan	29,25	30,00	28,14	87,39	
	Subdit Kapal Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Seksi Operasional Kapal Perikanan	28,50	30,00	29,84	88,34	
	Seksi Rancang Bangun dan Standardisasi Kapal Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	

• Direktorat Perizinan dan Kenyelayanan

Level	Unit	Nilai Aspek			Total Nilai	Rata-Rata Nilai
		Kepatuhan	Kesesuaian	Ketercapaian		
2	Direktorat Perizinan dan Kenyelayanan	27,95	28,13	32,15	88,23	86,70
3	Subdit Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan	27,00	28,13	27,38	82,51	
	Subdit Usaha Nelayan	27,00	28,13	32,31	87,43	
4	Seksi Perlindungan Nelayan	30,00	28,13	26,86	84,99	
	Seksi Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan	29,33	28,13	32,89	90,35	

4. Beberapa catatan yang perlu ditingkatkan pada unit kerja setelah proses rekon antara lain:

Unit Kerja	level 2	level 3	level 4
PSDI	<p>1. Aspek Kepatuhan: Terdapat data dukung yang belum sesuai dengan capaian IKU (IKU 7).</p> <p>2. Aspek Ketercapaian: NPSS pada TW I dan II masih dibawah 100% karena terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan.</p>	<p>1. Aspek Kesesuaian: Data realisasi salah satu IKU pada aplikasi Kinerja TW II belum diinput.</p>	<p>1. Aspek Kesesuaian: Data realisasi salah satu IKU pada aplikasi Kinerja TW II belum diinput.</p>

f. Indikator Kinerja 6: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Dit. Perizinan dan Kenyelayanan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4.	Tata kelola Dit. Perizinan dan Kenyelayanan yang baik	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Dit. Perizinan dan Kenyelayanan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	100	129,63	129,63%

**Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan Per Triwulan Tahun 2020
Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

No	No LHP	Objek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut			Sisa Temuan							
			Temuan (Kejadian)	Saran	Nilai Keuangan	Temuan (Kejadian)	Saran	Nilai Keuangan	Temuan		Saran		Nilai Keuangan			
									Proses	Pending	Proses	Pending	Proses	Pending		
1	4354/ITJ.0/HP.350/II/2020	Hasil Reviu Dokumen Pemeriksaan dan Pembayaran Tahap I Kegiatan Penyusunan Adendum ANDAL dan RKL-RPL Pembangunan PP Selat Lampa TA 2020 pada Direktorat Perizinan dan Kenyelayanan	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	TL November 2020
2	4367/ITJ/HP.230/III/2020	Hasil Probit Audit Dokumen Tender Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun 2020 pada Direktorat Perizinan dan Kenyelayanan, DJPT	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	4368/ITJ.0/HP.350/II/2020	Hasil Reviu Pembayaran Tahap I Kegiatan Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Ikan SKPT Natuna TA 2020 pada Dit. PDK DJPT	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	TL JULI 2020
4	4382/ITJ.2/HP.350/IV/2020	Laporan Hasil Reviu Dokumen Pemeriksaan dan Pembayaran Tahap II Pekerjaan Penyusunan Adendum Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Pembangunan Pelabuhan Perikanan (PP) Selat Lampa Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna TA 2020 pada Direktorat Perizinan dan Kenyelayanan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	TL JULI 2020

No	No LHP	Objek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut			Sisa Temuan							
			Temuan (Kejadian)	Saran	Nilai Keuangan	Temuan (Kejadian)	Saran	Nilai Keuangan	Temuan		Saran		Nilai Keuangan			
									Proses	Pending	Proses	Pending	Proses	Pending		
5	4393/ITJ/HP.350/IV/2020	Hasil Reviu Dokumen Pemeriksaan dan Pembayaran Tahap II Pekerjaan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Pembangunan Pasar Ikan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna TA 2020 pada Direktorat Perizinan dan Kenyelayanan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	TL JULI 2020
6	4572/ITJ/HP.350/IX/2020	Hasil Reviu Dokumen Pemeriksaan dan Pembayaran Tahap III Kegiatan Penyusunan Adendum ANDAL dan RKL-RPL Pembangunan PP Selat Lampa SKPT Natuna TA 2020 pada Direktorat Perizinan dan Kenyelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
7	4578/ITJ/HP350/IX/2020	LHR Pembayaran Termin I Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna TA 2020 (Kegiatan Hibah JICA Jepang) pada Direktorat Perizinan dan Kenyelayanan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap	1	5	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	
Rekap Total			9	13	-	7	7	-	1	2	1	6	-	-		
Persentase (%)						77,78%	53,85%		11,11%	22,22%	7,69%	46,15%				
TINDAK LANJUT :			77,78%													
BATAS :			60,00%	100,00%												
CAPAIAN :			129,63%													

g. Indikator Kinerja 7: Jumlah inovasi pelayanan publik Dit. Perizinan dan Kenyelayanan (inovasi)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
4.	Tata kelola Dit. Perizinan dan Kenyelayanan yang baik	7	Jumlah inovasi pelayanan publik Dit. Perizinan dan Kenyelayanan (inovasi)	1	1	100,00%

<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP</p> <p style="text-align: center;">MEMORANDUM NO. 140/D4.TK/TU/II/2021</p> <p>Yth : Pti. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Dari : Direktur Perizinan dan Kenelayanan Hal : Usulan Inovasi Pelayanan Publik Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) Lampiran : 1 (satu) Berkas Tanggal : 14 Januari 2021</p> <hr/> <p>Dalam rangka mewujudkan birokrasi lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, maka diperlukan inovasi pelayanan publik yang menjadi target inovasi. Salah satu target inovasi adalah sistem perizinan usaha penangkapan ikan, dan sebagai pendukung pengelolaan perizinan nasional yang terintegrasi pusat daerah inovasi tersebut menggunakan aplikasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat atau yang disingkat dengan SILAT.</p> <p>Berdasarkan Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan republik Indonesia Nomor PERMEN 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, salah satu fungsi adalah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan. Dampak penggunaan SILAT sangat dirasakan oleh pengusaha atau pemilik kapal, cepat dan efisien juga efektif. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan proposal inovasi pelayanan publik sistem dimaksud.</p> <p>Demikian kami sampaikan, mohon arahan Bapak Direktur Jenderal lebih lanjut. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  Ridwan Mulyana </div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Tembusan: Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap</p>	<p style="text-align: center;">PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK SISTEM INFORMASI IZIN LAYANAN CEPAT (SILAT)</p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> <p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2021</p>
---	---

h. Indikator Kinerja 8: Persentase unit kerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
4.	Tata kelola Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang baik	8	Persentase unit kerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	82	91,50	111,59%

Penilaian IKU MP Dit. PDK TW 4 (31 Desember 2020 - 17.15 WIB)

Dokumen	Target	Capaian	%
Renstra	1	1	100,00
Perjanjian Kinerja	14	14	100,00
Manual IKU	14	5	35,71
Laporan Kinerja	1	1	100,00
TOTAL	30	21	70,00

Keaktifan	Target	Capaian	%
Level 2	1	1	100,00
Level 3	4	4	100,00
Level 4	9	9	100,00
TOTAL	14	14	100,00

Keikutsertaan	Target	Capaian	%
Level 2	1	1	100,00
Level 3	4	4	100,00
Level 4	9	9	100,00
Staf	18	16	88,89
TOTAL	32	30	93,75

Komponen	Capaian	Bobot	%
Dokumen	70,00	20	14,00
Keikutsertaan	93,75	40	37,50
Keaktifan	100,00	40	40,00
TOTAL			91,50

i. Indikator Kinerja 9: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Dit. Perizinan dan Kenyelanaan (persen)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	
4.	Tata kelola Dit. Perizinan dan Kenyelanaan yang baik	9	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Dit. Perizinan dan Kenyelanaan (persen)	70	92,93	132,76%



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 18, BGDUNG MINA BAHARI III LANTAI 2, 3, 4
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130, JKP 10041
TELEPON (021) 3522310, FAKSIMILE (021) 3522310
LAMARAN: www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK: jem@kkp.go.id

HASIL EVALUASI TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN
PRIORITAS/BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KKP TA 2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Target kinerja utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun Anggaran 2019 dari perspektif *stakeholders* adalah Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan sebesar 57 dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto sebesar 11%. Target kinerja tersebut tentu harus ditopang oleh unsur-unsur pembentuknya, antara lain melalui produksi perikanan tangkap sebesar 8,4 juta ton, perikanan budidaya sebesar 10,36 juta ton dan rumput laut sebesar 19,54 juta ton, sehingga secara total produksi perikanan ditetapkan sebesar 38,3 juta ton, serta nilai ekspor hasil perikanan ditargetkan sebesar 9,5 miliar dolar AS. Dalam rangka mewujudkan target-target tersebut ditetapkan berbagai kegiatan prioritas, yang memenuhi beberapa kriteria, antara lain memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat, memiliki anggaran besar, mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional, mendukung pencapaian prioritas nasional, dan/atau arahan direktif presiden.

Program prioritas yang ditetapkan pada masing-masing unit Eselon I memiliki fokus pada peningkatan produksi untuk suplai pangan domestik dan ekspor, memperbesar kontribusi sektor perikanan terhadap PDB dan perbaikan struktur ekonomi serta dapat langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas dalam bentuk penyaluran bantuan kepada masyarakat, antara lain pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) berupa Kapal Penangkap Ikan, Alat Penangkapan Ikan dan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) berupa Excavator, Pengelolaan Ingasi Tambak Partisipatif (PITAP), Mesin Pakan Mandiri dan Sarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok; Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJURL) berupa Demaga Apung dan Struktur Hybrid; serta Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan (DJPPS) berupa Ice Flake Machine 1,5 ton, Ice Flake Machine 5 ton, Chest Freezer dan Kendaraan Berpendingin.

Pada dasarnya sebagian besar kegiatan prioritas tersebut didanai melalui alokasi bantuan pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan Bantuan Pemerintah. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah. Sesuai tugas dan fungsinya, Inspektoral Jenderal KKP melakukan

sedangkan sembilan penerima bantuan API lainnya tidak memanfaatkan API yang diterima. Kondisi tersebut disebabkan bantuan API yang diberikan, yaitu rawai dasar tidak sesuai dengan kebutuhan, yaitu jaring (rampung).

b. Bantuan API di Kota Gunungsitoli telah beroperasi, namun penerima bantuan belum membuat laporan/pencaharian hasil produksi.

3. Bantuan Premi Asuransi Nelayan
Jumlah Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) pada lokasi pemeriksaan fisik dan uji substansi sebanyak 21.346 penerima dan dilakukan evaluasi terhadap 705 penerima dengan hasil penilaian sebesar 92,93 dan rincian untuk masing-masing lokasi kabupaten/kota disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Penilaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan TA 2019

Kabupaten/ Kota	Jumlah		Skor Rata-Rata			
	Bantuan	Dievaluasi	Pencapaian Tujuan (bobot: 80)	Integrasi (bobot: 10)	Adaptasi (bobot: 10)	Total (bobot: 100)
Langkat	729	24	80,00	7,92	7,29	95,21
Kota Gunungsitoli	305	31	80,00	8,15	9,35	97,50
Serang Bedagai	1115	27	77,04	5,19	10,00	92,22
Dengkalis	889	15	80,00	7,17	5,00	92,17
Indragiri Hilir	1501	42	80,00	7,50	5,00	92,50
Indragiri Hulu	285	24	80,00	10,00	5,00	95,00
Kampar	1023	19	80,00	10,00	5,00	95,00
Rokan Hilir	472	13	12,31	1,15	0,77	14,23
Pandeglang	118	15	80,00	7,00	5,00	92,00
Seratus	688	40	80,00	6,81	6,76	91,06
Indramayu	1632	82	80,00	9,94	5,30	95,24
Subang	212	27	80,00	8,52	10,00	98,52
Karawang	304	20	80,00	10,00	5,00	95,00
Tasikmalaya	165	18	80,00	10,00	5,00	95,00
Dlailcap	1073	20	80,00	9,38	6,00	95,38
Demak	1363	15	80,00	9,17	8,67	97,83
Semarang	133	15	66,67	5,00	6,00	77,67
Gresik	2123	17	80,00	8,53	9,41	97,94
Probolinggo	587	16	80,00	10,00	7,50	97,50
Sidoarjo	92	45	80,00	9,89	5,00	94,89
Tuban	523	16	80,00	7,34	5,00	92,34
Tulungagung	230	15	80,00	10,00	6,33	96,33
Bone	1797	31	80,00	7,98	10,00	97,98
Bulukumba	867	15	80,00	2,33	10,00	92,33
Kep. Selayar	808	27	80,00	9,63	5,00	94,63
Pangkep	488	15	80,00	10,00	10,00	100,00
Sinjai	847	33	80,00	3,48	8,03	91,52
Wajo	997	28	80,00	8,57	5,18	93,75
JUMLAH *	21346	705	78,35	8,05	6,52	92,93

Keterangan:
* skor rata-rata jenis bantuan dihitung dari rata-rata data keseluruhan kabupaten/kota

j. Indikator Kinerja 10: Nilai IKPA Dit. Perizinan dan Kenyelayan (nilai)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
4.	Tata kelola Dit. Perizinan dan Kenyelayan yang baik	10	Nilai IKPA Dit. Perizinan dan Kenyelayan (nilai)	88	75,92	86,27%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

323	175	452969	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SETJEN KKP	Nilai	100,00	56,23	100,00	0,00	50,00	100,00	100,00	98,39	0,00	79,17	100,00	0,00	100,00	51,68	59%	89,10	97,28	83,39	100,00	20,00	96,71	
				Bobot	0	0	5	0	8	5	5	15	0	10	5	0	5									
				Nilai Akhir	0,00	0,00	5,00	0,00	4,00	5,00	5,00	14,76	0,00	7,92	5,00	0,00	5,00									
				Nilai Aspek		100,00							92,52				100,00									
324	175	452997	DIREKTORAT PELABUHAN PERIKANAN DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100,00	71,24	99,97	52,17	66,67	100,00	100,00	59,90	100,00	98,61	97,30	0,00	80,00	67,87	85%	79,85	77,46	62,94	64,37	7,01	66,28	
				Bobot	0	0	5	15	8	5	5	15	12	10	5	0	5									
				Nilai Akhir	0,00	0,00	5,00	7,83	5,33	5,00	5,00	8,99	12,00	9,86	4,87	0,00	4,00									
				Nilai Aspek		99,97			79,71			88,95					80,00									
325	175	453003	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100,00	72,07	100,00	100,00	88,89	100,00	100,00	25,41	100,00	82,05	100,00	0,00	100,00	71,13	85%	83,68	34,37	0,00	0,00	0,35	17,91	
				Bobot	0	0	5	15	8	5	5	15	12	10	5	0	5									
				Nilai Akhir	0,00	0,00	5,00	15,00	7,11	5,00	5,00	3,81	12,00	8,21	5,00	0,00	5,00									
				Nilai Aspek		100,00			97,22			76,87					100,00									
326	175	465017	DIREKTORAT PENGELOAAN SUMBER DAYA IKAN DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100,00	73,72	100,00	40,00	100,00	100,00	100,00	95,40	100,00	100,00	100,00	0,00	95,00	75,06	85%	88,31	97,08	69,19	94,45	-4,79	72,54	
				Bobot	0	0	5	15	8	5	5	15	12	10	5	0	5									
				Nilai Akhir	0,00	0,00	5,00	6,00	8,00	5,00	5,00	14,31	12,00	10,00	5,00	0,00	4,75									
				Nilai Aspek		100,00			85,00			98,85				95,00										
327	175	465023	DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENYELAYANAN	Nilai	100,00	51,22	100,00	58,82	60,00	100,00	100,00	64,94	68,75	82,05	99,32	0,00	95,00	64,54	85%	75,92	90,84	20,80	100,00	20,00	84,88	
				Bobot	0	0	5	15	8	5	5	15	12	10	5	0	5									
				Nilai Akhir	0,00	0,00	5,00	8,82	4,00	5,00	5,00	9,74	8,76	8,71	4,67	0,00	4,75									
				Nilai Aspek		100,00			79,71			78,77				95,00										
328	175	465094	DIREKTORAT KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN	Nilai	100,00	74,80	99,96	97,53	40,00	100,00	100,00	71,39	99,65	83,33	99,29	100,00	95,00	78,54	90%	87,37	84,06	92,76	100,00	-0,10	82,76	
				Bobot	0	0	5	15	8	5	5	15	12	10	5	5	5									
				Nilai Akhir	0,00	0,00	5,00	14,63	3,20	5,00	5,00	10,71	11,96	8,33	4,96	5,00	4,75									
				Nilai Aspek		99,96			84,38			88,42				97,50										
329	175	465000	DIREKTORAT PERBENIHAN	Nilai	100,00	98,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	57,13	100,00	83,33	100,00	0,00	90,00	70,40	85%	89,89	97,48	98,64	92,37	1,78	83,16	
				Bobot	0	0	5	15	8	5	5	15	12	10	5	0	5									
				Nilai Akhir	0,00	0,00	5,00	15,00	8,00	5,00	5,00	8,57	12,00	8,33	5,00	0,00	4,50									
				Nilai Aspek		100,00			100,00			85,12				90,00										
330	175	465079	DIREKTORAT PRODUKSI DAN USAHA PERIKANAN SUDJADAYA	Nilai	100,00	0,00	99,96	93,75	85,71	100,00	100,00	25,78	92,86	83,33	89,36	0,00	80,00	67,73	85%	79,68	45,31	0,00	33,63	-20,00	19,02	
				Bobot	0	0	5	15	8	5	5	15	12	10	5	0	5									
				Nilai Akhir	0,00	0,00	5,00	14,06	6,86	5,00	5,00	3,87	11,14	8,33	4,47	0,00	4,00									
				Nilai Aspek		99,96			94,87			72,83				80,00										
331	175	465094	DIREKTORAT PERIKANAN DAN ALAT IKAN	Nilai	100,00	79,35	99,98	85,71	85,71	100,00	100,00	37,80	100,00	76,00	97,83	0,00	100,00	60,70	85%	82,10	59,84	94,11	84,00	-15,90	63,83	
				Bobot	0	0	5	15	8	5	5	15	12	10	5	0	5									
				Nilai Akhir	0,00	0,00	5,00	12,86	6,86	5,00	5,00	5,88	12,00	7,50	4,89	0,00	5,00									
				Nilai Aspek		99,98			92,00			77,00				100,00										

Jakarta, 15 Januari 2021
Direktur Perizinan dan Kenyelayan

Ridwan Mulyana



SKPT Natuna



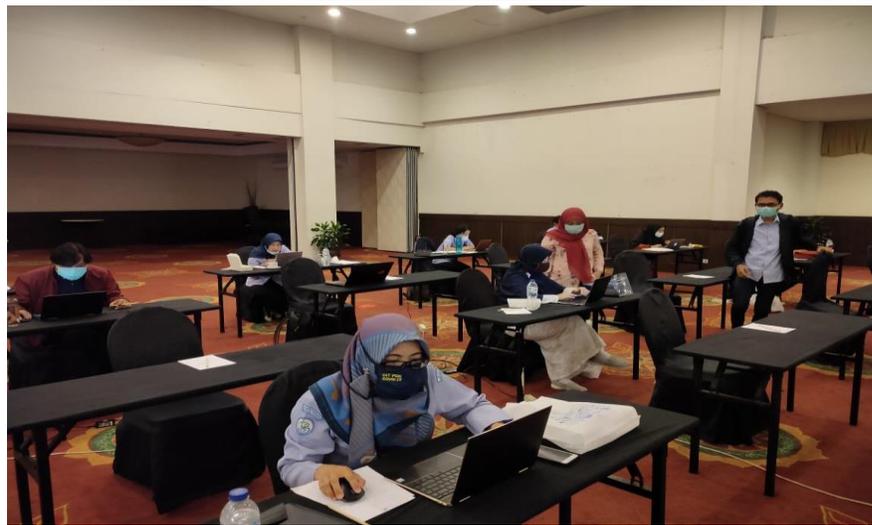
Peresmian SKPT Natuna

Dokumentasi kegiatan dalam rangka peningkatan IP ASN



Kegiatan Sosialisasi penataan dan pembinaan jabatan fungsional untuk mendorong ASN lebih profesional dalam bekerja
(Bogor – 4 s/d 6 November 2020)

Dokumentasi Kegiatan Rekonsiliasi Kinerja Bogor – 18 Agustus 2020



Dokumentasi kegiatan



Kegiatan SPIP dalam rangka pengendalian Intern sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan kegiatan yang ada di Dit. Perizinan dan Kenyelayan

Dokumentasi Peluncuran SILAT (Sistem Informasi Pelayanan Cepat) Sebagai bentuk Inovasi dalam pelayanan publik



Dokumentasi Kegiatan Prioritas

Dokumentasi Kegiatan Diversifikasi Usaha Nelayan



“Praktek pembuatan olahan ikan di Muara Gembong, Bekasi”



“Praktek pembuatan olahan ikan di Pandeglang, Serang”



“Praktek Labelling dan packaging di Kota Serang”

Dokumentasi Kegiatan SEHAT :



Kegiatan Sinergis, Koordinasi dan Sinkronisasi Fasilitasi Sertipikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Provinsi Gorontalo

